

I. PENDAHULUAN

Dalam tatanan dunia yang semakin kompleks, membangun hubungan baik antarnegara melalui diplomasi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama semua elemen dalam suatu negara. *Total diplomacy* yang melibatkan pemerintah sebagai kekuatan eksekutif dan parlemen sebagai pembawa mandat dalam bidang legislatif akan memberikan hasil maksimal dalam membawa kepentingan Indonesia ke dunia internasional.

Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur diplomasi lintas bangsa dan negara. Salah satu agenda nasional di bidang hubungan luar negeri menekankan perlunya citra Indonesia yang positif dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, **Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)** sebagai ujung tombak diplomasi DPR-RI diharapkan mampu memainkan *the art of diplomacy* secara baik, tepat, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan pencitraan Indonesia di mata komunitas internasional. Tiga citra utama yang pada saat ini diusung politik luar negeri dan diplomasi RI adalah citra Indonesia sebagai negara demokratis, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan pluralistik, serta Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip luar negeri yang bebas dan aktif.

DPR-RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur diplomasi lintas bangsa dan negara. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR-RI merupakan unsur penting yang dapat berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya menggapai cita-cita bersama agar dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia, selain memperjuangkan kepentingan nasional bangsa Indonesia tentunya.

Saat ini Indonesia adalah negara yang berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi. Keberhasilan ini menciptakan kekuatan diplomasi bagi BKSAP dalam melakukan lobi-lobi di forum-forum regional maupun internasional serta dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia di politik internasional. Oleh karena itu BKSAP memanfaatkan kekuatan ini dengan berperan aktif di kancah internasional untuk memberikan kontribusi positif bagi kepentingan Indonesia.

Dalam rangka kelancaran tugas, Pimpinan dan Anggota BKSAP membagi dalam desk, yaitu **Desk Kerja Sama Internasional**, yang menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama internasional termasuk keanggotaan DPR-RI di berbagai organisasi internasional seperti *Inter-Parliamentary Union, Parliamentary Union of OIC Countries*, dan badan-badan dibawah PBB; **Desk Kerja Sama Regional** yang mempunyai tugas menangani kegiatan yang terkait dengan kerjasama regional yang meliputi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Asian Parliamentary Assembly*, dan organisasi regional lainnya; dan **Desk Kerja Sama Bilateral** yang mempunyai tugas terkait kerjasama bilateral yang meliputi kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB), penerimaan kunjungan delegasi parlemen negara lain, pengiriman delegasi muhibah dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Ketua BKSAP menjadi koordinator atas tiga Desk tersebut, sementara tiga Wakil Ketua BKSAP menjadi Ketua dari masing-masing Desk.

Berdasarkan Pemilihan dan Penetapan Pimpinan BKSAP DPR-RI tahun sidang 2009 – 2010 pada tanggal 21 Oktober 2009 ditetapkan :

1. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. F-PKS
Ketua
2. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. F-PD
Wakil Ketua/Koordinator Desk Kerja Sama Internasional
3. Sidarto Danusubroto F-PDIP
Wakil Ketua/Koordinator Desk Kerja Sama Regional
4. Ir. Muhammad Najib F-PAN
Wakil Ketua/Koordinator Desk Kerja Sama Bilateral

Selanjutnya dalam Rapat Pleno BKSAP pada tanggal 23 Agustus 2010 ditetapkan Pimpinan BKSAP DPR-RI tahun sidang 2010 2011 dengan susunan keanggotaan tetap sebagaimana diatas.

Rapat Pleno BKSAP tanggal 30 September 2010, menetapkan pergantian Wakil Ketua/Koordinator Desk Kerjasama Bilateral yang semula Ir. Muhammad Najib, M.Sc menjadi Ir. H. Azwar Abubakar, MM.

Untuk keanggotaan BKSAP saat ini terdapat 51 (lima puluh satu) Anggota yang berasal dari semua Fraksi dan Komisi yang beragam (Lampiran 1).

BKSAP telah membawa nama DPR-RI untuk berperan aktif dalam diplomasi RI baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Peran tersebut dijalankan melalui antara lain partisipasi aktif dalam sidang-sidang organisasi parlemen regional dan internasional, peraihan jabatan-jabatan penting di organisasi-organisasi parlemen dunia, penyelenggaraan sidang-sidang di Indonesia, penguatan kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat, dan tukar pandangan dengan delegasi tamu dari parlemen negara sahabat.

Dalam kaitan itu, Laporan Kinerja Tahunan BKSAP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas fungsi dan tanggung-jawab BKSAP dalam melancarkan diplomasi parlemen sesuai aturan-aturan yang termaktub dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD, serta Tata Tertib DPR-RI Tahun 2009.

II. LINGKUP KERJASAMA BILATERAL

Dalam lingkup kerjasama bilateral, DPR-RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI dengan Parlemen Negara-negara sahabat. GKSB DPR-RI dibentuk dengan tujuan utama untuk mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat khususnya di tingkat parlemen dan membangun mitra kerja dengan negara-negara sahabat. Diplomasi internasional yang dilakukan DPR-RI diselenggarakan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat untuk kepentingan RI. DPR RI juga berperan selain menjembatani hubungan *parliament to parliament* juga hubungan *people to people*. Dengan dibentuknya GKSB DPR-RI – Parlemen Negara-negara Sahabat diharapkan DPR-RI dapat memberikan rekomendasi dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain dan juga upaya penyelesaian masalah yang mungkin terjadi antara dua negara.

Untuk Periode DPR-RI 2009-2014 telah dibentuk 59 (lima puluh sembilan) GKSB DPR-RI dari sebelumnya 38 (tiga puluh delapan) GKSB sehingga terjadi penambahan sebanyak 21 (dua puluh satu) GKSB (Lampiran 2). Peresmian GKSB DPR-RI – Parlemen Negara Sahabat telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2010. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Badan DPR-RI, Ketua dan Wakil Ketua dari tiap GKSB, Menteri Luar Negeri serta Duta Besar Negara-negara Sahabat. Acara tersebut yang diisi dengan pergelaran *Simphony Untuk Negeri* pimpinan Amir Katamsi juga diliput secara langsung oleh RRI.

Dalam membangun kerjasama bilateral, GKSB dapat melakukan kunjungan bilateral ke Parlemen negara-negara yang menjadi *counter-part*-nya, selain kegiatan lain seperti presentasi Duta Besar dan diskusi dengan pakar yang ahli dalam pengetahuan mengenai negara tersebut. Sesuai dengan *Standard Operating Procedure* perjalanan luar negeri dan Pedoman GKSB, setiap Anggota GKSB DPR-RI memiliki hak untuk melakukan kunjungan kerja GKSB sebanyak satu kali selama periode 2010 – 2014. Setiap GKSB dapat membuat usulan rencana kunjungan kepada Pimpinan BKSAP dengan menyampaikan misi dari kunjungan tersebut. Berkaitan dengan usulan rencana kunjungan GKSB tersebut, Pimpinan BKSAP akan mengambil keputusan mengenai GKSB yang diprioritaskan untuk berangkat dengan mempertimbangkan urgensi dan misi kunjungan serta keaktifan GKSB dalam melakukan kegiatan dan

menjalin hubungan dengan Kedutaan Besar atau pihak terkait lainnya. Sampai bulan Oktober 2010 Desk Kerja Sama Bilateral telah melaksanakan kunjungan tiga GKSBB yaitu GKSBB DPR-RI – Parlemen Maroko, GKSBB DPR-RI – Parlemen Tajikistan, dan GKSBB DPR-RI – Parlemen Kuba, dengan pokok-pokok hasil kunjungan sebagai berikut:

1. GKSBB DPR-RI – Parlemen Maroko

Kunjungan GKSBB DPR-RI – Parlemen Maroko ke Maroko dilaksanakan tanggal 25 – 27 September 2010. Delegasinya terdiri dari:

Ir. M. Muhammad Najib, M.Sc.	F-PAN	Ketua,
H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.	F-PKS	Wakil Ketua,
Darizal Basir	F-PD	Anggota,
Mayjen (Purn.) Salim Mengga	F-PD	Anggota,
Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M.	F-PG	Anggota, dan
Dewi Aryani Hilman	F-PDIP	Anggota.

Dalam kunjungan tersebut delegasi antara lain bertemu dengan Wakil Ketua Majelis An-Nouwwab (*Lower House*) Maroko dan membahas mengenai upaya pengembangan hubungan kedua negara di berbagai bidang, khususnya ekonomi, perdagangan, dan pendidikan.

Dalam bidang ekonomi, GKSBB DPR-RI – Parlemen Maroko memandang perlunya segera ditindaklanjuti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran langsung antara kedua negara guna meningkatkan kerjasama ekonomi dan pariwisata kedua negara.

Selanjutnya, dalam bidang Perdagangan dengan melihat kenyataan akan potensi pasar Maroko yang sangat besar untuk produk kertas dan kemasan, pengusaha Indonesia diharapkan dapat menjadikan pasar nontradisional Maroko sebagai tempat pemasaran produk-produk Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, Maroko mengharapkan lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Maroko dan pemerintah Maroko menyediakan beasiswa bagi pelajar Indonesia. Selain itu diharapkan agar dapat ditingkatkan saling kunjung, baik antar instansi pendidikan maupun tenaga-tenaga pengajar dari kedua negara untuk bertukar pengalaman dan berbagi kepakaran di bidang masing-masing.

2. GKSb DPR-RI – Parlemen Tajikistan

Kunjungan GKSb DPR-RI – Parlemen Tajikistan ke Tajikistan dilaksanakan tanggal 11 – 14 Oktober 2010. Komposisi Delegasi terdiri dari:

Ir. H.M. Rosyid Hidayat	F-PD	Ketua,
Rohmani, S.Pd.	F-PKS	Wakil Ketua,
Ir. Sutarip Tulis Widodo	F-PD	Anggota, dan
Irene Manibuy, S.H.	F-PG	Anggota.

Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk melihat potensi kerjasama bilateral di Tajikistan, sekaligus mengembangkan kerjasama antar parlemen kedua negara. Tajikistan berharap agar Indonesia dapat berinvestasi di Tajikistan mengingat potensi yang ada di negara tersebut yang cukup besar seperti PLTA yang cukup besar dan mengharapkan pembangunan infrastruktur, kaya dengan produksi kapas dan buah-buahan serta pariwisata. Diharapkan Indonesia dapat memainkan peran di Tajikistan mengingat potensi yang cukup besar di Tajikistan belum terekplorasi oleh pihak asing. Untuk itu, Tajikistan mengundang forum bisnis Indonesia untuk berkunjung ke Dushanbe untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut.

3. GKSb DPR-RI – Parlemen Kuba

Kunjungan GKSb DPR-RI – Parlemen Kuba dilaksanakan tanggal 25 September – 2 Oktober 2010. Komposisi Delegasi terdiri dari:

Ir. H. Daryatmo Marditanto	F-PDIP	Ketua,
Vena Melinda, S.E.	F-PD	Wakil Ketua,
Ir. Bahrum Daido, M.Si.	F-PD	Anggota,
Ir. H. Azam Azman Natawijana	F-PD	Anggota,
Ir. H.M. Idris Laena	F-PG	Anggota,
Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.	F-PDIP	Anggota,
Drs. H. Abdul H. Naja, M.Si.	F-PAN	Anggota, dan
Drs. H. Nu'man Abdul Hakim	F-PPP	Anggota.

Dalam kunjungan ini diadakan seminar dengan Parlemen Kuba guna membahas evaluasi 50 tahun hubungan kerjasama kedua negara, serta menggali potensi kerjasama yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

a. Bidang Pendidikan dan Olahraga

DPR-RI akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kuba di bidang kedokteran dan bioteknologi. Di bidang olahraga, perlu didorong pertukaran atau kerjasama timbal balik cabang olahraga unggulan masing-masing, antara lain bulu tangkis Indonesia dengan cabang olahraga bola voli, tinju, dan atletik dari Kuba.

b. Bidang Ekonomi dan Industri

Pihak Indonesia menyatakan ketertarikan untuk mempelajari keunggulan yang dimiliki Kuba mengingat hasil gula dari pabrik-pabrik Kuba relatif cukup tinggi dengan rata-rata 105– 110 kg gula per ton tebu. Dalam hal ini, kerjasama kedua negara di bidang gula telah memiliki payung hukum dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani pada tahun 2006 yang mencakup pertukaran tenaga ahli dan pengalaman masing-masing di bidang pergulaan. Kuba menyarankan kiranya upaya-upaya kerjasama dapat diarahkan untuk memanfaatkan produk-produk turunan gula antara lain untuk sumber energi, alkohol, produk farmasi, dan produk kecantikan.

c. Bidang Kesehatan

Sampai saat ini Kuba masih membuka kesempatan kerjasama dengan Indonesia di bidang penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan. Pihak Kuba menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama di bidang farmasi diantaranya obat/vaksin yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Heberprot-P dan vaksin Meningitis yang permintaannya cenderung meningkat ketika musim haji.

Selain pengiriman delegasi GKSB, BKSAP juga melakukan kunjungan teknis bilateral untuk tujuan khusus. Pada tahun 2010 telah dilakukan satu kunjungan teknis BKSAP yaitu ke China untuk mendesak parlemen negara tersebut untuk ikut aktif dalam APA dan menjadi *observer* di *Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC)*. Kunjungan teknis BKSAP ke China dilaksanakan tanggal 15 – 21 Oktober 2010. Dalam kunjungan tersebut Delegasi mengadakan pertemuan dengan Ketua Parlemen China dan tokoh masyarakat Muslim di Beijing yang mengajak komunitas Muslim di China kiranya dapat berperan dalam organisasi masyarakat

muslim internasional seperti OKI dan PUIIC. Selain itu kunjungan teknis ini dilakukan untuk mempererat hubungan kedua Parlemen dan kedua belah pihak sepakat bahwa kedua Parlemen dapat memainkan peran penting dalam forum internasional.

Selain pembentukan GKSDB DPR-RI dan pengiriman delegasi teknis ke luar negeri, DPR-RI menerima kunjungan dari Kepala Negara, Ketua Parlemen, Duta Besar, dan Perwakilan Negara Sahabat, pimpinan organisasi internasional, serta kunjungan GKSDB negara sahabat dalam bentuk *courtesy call* dan *friendly talk* (terlampir).

Dalam setiap pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai upaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Parlemen Indonesia dan parlemen negara sahabat yang bersangkutan. Kerjasama yang dibahas mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, saling dukung dalam forum parlemen internasional, penandatanganan berbagai MoU serta tindak lanjut dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pertemuan juga membahas mengenai isu-isu global terkini, antara lain mengenai pelaksanaan demokrasi, masalah lingkungan hidup, komitmen bersama untuk melawan terorisme dan lain-lain yang menjadi perhatian bersama.



III. LINGKUP KERJASAMA REGIONAL

Dalam lingkup kerjasama regional, BKSAP DPR-RI telah mengirimkan delegasi untuk berperan aktif dalam sidang-sidang parlemen regional, yaitu:

1. Sidang *APA Sub Committee Meeting on Integrated Energy Market in Asia, 2 – 5 November 2009 di Istanbul, Turki.*

Dalam sidang ini DPR-RI diwakili oleh Max Sopacua, SE, M.Sc. (F-PD) sebagai Ketua Delegasi dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA (F-PG) sebagai Anggota Delegasi.

Sidang tersebut dihadiri oleh 46 orang anggota parlemen dari delapan negara yaitu Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Federasi Rusia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, dan Turki. Delegasi DPR-RI berperan aktif selama persidangan dan berupaya mengakomodir kepentingan semua negara peserta sekaligus mengupayakan tercapainya kepentingan nasional Indonesia di forum APA melalui usulan DPR-RI yang diadopsi dalam *Draft Resolution on Integrated Market in Asia* (terlampir). Indonesia ditunjuk pula sebagai salah satu anggota *Advisory Group of Energy* yang akan berperan penting dalam merealisasikan *Integrated Energy Market in Asia dan Asia Gas Network (AGN)*.

Beberapa hasil keputusan sidang adalah sebagai berikut:

- a. *Draft Resolution on Integrated Energy Market in Asia* dan *Report of the Meeting of the Sub Committee on Integrated Energy Market in Asia* yang telah diadopsi dalam Sidang Pleno ke-4 APA pada tanggal 7-10 Desember 2009 di Bandung.
- b. Indonesia bersama Iran, Filipina, Rusia, Saudi Arabia, Turki, dan Bangladesh telah ditunjuk untuk segera membentuk *Advisory Group on Energy* dan mengirimkan nama-nama tenaga ahli di bidang energi yang akan menjadi anggota Group tersebut kepada Sekretariat Tetap APA.
- c. *Advisory Group on Energy* akan menyelenggarakan sidang pada pertengahan Februari 2010 di Saudi Arabia dan *Sub Committee on Energy* akan bersidang pada bulan Mei 2010 di Federasi Rusia untuk membahas hal yang sama.

2. Sidang *Sub Committee Meeting on Financial Regulations APA*, 13–16 November 2009 di Tehran, Iran.

Dalam sidang ini, DPR-RI diwakili oleh Sidarto Danusubroto (F-PDIP) sebagai Ketua Delegasi dan Nusron Wahid (F-PG) sebagai Anggota Delegasi. Pertemuan *Ad-Hoc Committee Meeting on Financial Regulations APA*, diikuti oleh tiga negara yaitu Bahrain, Indonesia, dan Iran serta Sekjen APA. Dalam pertemuan ini telah dibahas draf regulasi keuangan organisasi APA dan draf proposal Sekjen APA tentang *Scale of Assessment of Contribution by Member Parliament to the Regular Budget of APA*. Pada akhir pertemuan ini telah menghasilkan *Report of the Meeting of Ad-Hoc Committee APA Financial Regulations*.

Pertemuan kemudian menyepakati draf yang telah direvisi untuk disampaikan pada Sidang Pleno ke-4 APA untuk mendapat persetujuan. Sekjen APA juga telah mengusulkan adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk menambah anggaran dan sekiranya memungkinkan nantinya anggaran kegiatan APA dapat dibiayai dari kontribusi pihak swasta, dan usulan tersebut mendapat dukungan karena diharapkan bisa membantu kontribusi bagi anggaran Sekretariat APA. Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan penetapan besaran kontribusi berdasarkan pendekatan *Gross Domestic Product (GDP)* dengan pendekatan *income* bukan *Purchasing Power Parity (PPP)* mengingat perbedaan indeks harga konsumen dari satu negara dengan yang lain tidak bisa diukur dengan poin angka konsumsi yang sama. Berdasarkan usulan tersebut, Indonesia akan mempunyai kewajiban kontribusi sebesar tiga persen dari total *expenditure* APA setiap tahunnya.

3. Sidang Umum ke-14 *Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)*, 17 - 19 November 2009 di Koror, Republik Palau.

Delegasi DPR-RI diwakili oleh:

Drs. H. Adang Daradjatun	F-PKS,
Dra. Hj. Okky Asokawati, MSi	F-PPP, dan
Alm. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin	F-PKB.

Sidang dihadiri oleh 25 orang delegasi dari delapan negara, dari keseluruhan anggota APPCED yang berjumlah 46 negara. Negara anggota yang hadir yaitu: China, Indonesia, Kanada, Kiribati, Korea Selatan, Malaysia, Republik Palau, dan Sri Lanka. Langkah-langkah terpadu tiap negara dalam mengantisipasi perubahan iklim menjadi fokus sidang tahun ini. Republik Palau, Mikronesia, dan Kepulauan Marshall telah mengesahkan *alternative energy initiative* yang dikenal dengan *Green Energy Micronesia Initiative*. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peralihan dari ketergantungan pada minyak bumi ke energi alternatif lainnya, untuk itu perubahan iklim menjadi masalah serius dan menjadi perhatian dunia.

Delegasi DPR-RI telah berperan aktif selama persidangan. Dalam laporannya, delegasi menyampaikan bahwa Indonesia sangat aktif mengatasi dampak perubahan iklim yang sedang dihadapi dunia, oleh karena itu Indonesia mendukung keputusan maupun kebijakan PBB seperti meratifikasi UNFCCC dan *Kyoto Protocol*. Salah satu langkah nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia mengeluarkan *National Action Plan in Addressing Climate Change*. Ada tiga langkah yang perlu dilakukan antara lain program diversifikasi energi, konservasi energi, dan *clean technology* seperti *carbon capture and storage*. Juga disampaikan bahwa Indonesia menyelenggarakan *World Ocean Conference* (WOC) tanggal 11 – 14 Mei 2009 di Manado yang membahas mengenai dampak perubahan iklim yang sangat serius terhadap negara-negara berpantai. Dalam mendukung kebijakan terhadap perubahan iklim, Pemerintah RI juga telah mengembangkan dua sumber utama energi alternatif yaitu *bio-fuel* dan *geothermal*. Sebagai negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, selayaknya Indonesia mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan tersebut.

Sidang ini telah mengesahkan *Palau Declaration on the Theme of Climate Change and Alternative Energy Development*, yang memutuskan antara lain:

- Meningkatkan penelitian, pengembangan teknologi energi alternatif sebagai bagian vital perlindungan lingkungan dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kerjasama antarnegara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menyediakan kebutuhan energi dan untuk alih teknologi energi alternatif.

- Menjamin *capacity building* nasional semua negara anggota APPCED dalam mengembangkan prasarana modern dan mendapatkan manfaat kapasitas dan tantangan unik masing-masing bangsa untuk menghasilkan serta menggunakan teknologi energi alternatif yang tepat.

Selanjutnya sidang tersebut juga telah mengakui isi *Manado Ocean Declaration* bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang akan membawa dampak bagi negara kepulauan, terutama negara-negara dengan pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan Asia Pasifik.

4. Seminar AIPA dengan tema *The Role of Women Parliamentarians in Law-Making Process*, 29 November – 3 Desember 2009 di Hanoi, Vietnam.

Delegasi diwakili oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD) dan Lili Chodijah Wahid (F-PKB). Seminar ini dihadiri oleh delegasi dari AIPA *Permanent Secretariat* dan beberapa negara anggota ASEAN yaitu: Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, dan Vietnam serta organisasi internasional seperti UNDP, UNICEF, dan UNIFEM. Pertemuan ini menggarisbawahi bahwa perlunya anggota parlemen perempuan dapat berperan penting dalam melaksanakan representasi, legislasi, pengawasan, dan memastikan kesetaraan gender dalam proses pembuatan undang-undang. Proses kesetaraan gender yang diatur dalam pembuatan undang-undang diperlukan untuk memastikan dukungan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional dan menikmati perkembangan di masing-masing negara.

Delegasi DPR-RI telah berperan aktif selama persidangan, dengan mengupayakan harapannya agar seminar ini dapat semakin mendorong peran perempuan dalam memberikan andil positif bagi pembangunan politik, ekonomi, dan sosial dan mendorong perempuan-perempuan ASEAN aktif di parlemen untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait andilnya dalam hal proses pembuatan undang-undang. Delegasi juga menyatakan dukungan bagi perempuan di ASEAN untuk

mendiskusikan langkah-langkah dalam mempercepat realisasi *Beijing Platform for Action* di tingkat nasional dan regional. Selain itu, delegasi juga menyatakan akan selalu memasukkan perspektif gender dalam setiap proses perumusan kebijakan.

5. Sidang *The Fourth Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly (APA)*, 7 – 10 Desember 2009 di Bandung, Indonesia.

Delegasi DPR-RI terdiri dari :

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI, Penasehat,
Drs. H. Priyo Budi Santoso	Wakil Ketua DPR-RI, Koordinator,
Sidarto Danusubroto	F-PDIP Ketua Delegasi,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid	F-PKS Anggota,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	F-PD Anggota,
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	F-PAN Anggota,
Dr. Abdurrahman Abdullah	F-PD Anggota,
Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	F-PG Anggota,
Evita Nursanty	F-PDIP Anggota,
Hj. Herlini Amran, M.A.	F-PKS Anggota,
Dra. Okky Asokawati, M.Si.	F-PPP Anggota, dan
Alm. Prof.Drs. H. Cecep Syarifuddin	F-PKB Anggota.

Sidang Umum ke-4 APA yang diikuti sekitar 174 perwakilan parlemen dari 29 negara, dua negara peninjau dan tiga organisasi parlemen yaitu: *Arab Inter Parliamentary Union (AIPU)*, *Parliamentary Union of OIC Member State (PUIC)*, serta *Inter-Parliamentary Assembly of the Euroasian Economic Community*.

Opening Ceremony Sidang Pleno ke-4 *Asian Parliamentary Assembly (APA)* dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 8 Desember 2009, di Gedung Merdeka (KAA) Jl. Asia Afrika, Bandung. Kepala Negara juga mengapresiasi tema Sidang Umum ke-4 APA yang bertajuk “Peranan Parlemen-Parlemen Asia dalam memperkuat Demokrasi, menuju Perdamaian, Kemakmuran, dan Keadilan di Kawasan Asia”. Tema itu sesungguhnya sangat erat dengan tekad dan semangat bangsa Indonesia. Presiden APA/Ketua DPR-RI berharap APA dapat melakukan tindakan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan besar dan kompleks, turut membantu pemerintah

masing-masing menyelesaikan sejumlah permasalahan antara lain kekerasan dan terorisme.

Sidang Pleno Ke-4 APA telah menghasilkan 15 butir Deklarasi Bandung, dan 11 Resolusi APA (terlampir). Deklarasi Bandung dan 11 resolusi yang dihasilkan sidang ini, memperlihatkan sikap politik Parlemen Asia terhadap beragam persoalan dan isu di kawasan Asia, termasuk potensi ekonomi. Deklarasi Bandung berisi kesepakatan mengenai penguatan demokrasi, keamanan dan perdamaian, perubahan iklim, korupsi, promosi, dan perlindungan hak asasi manusia serta penguatan partisipasi perempuan dalam politik dan proses pembuatan kebijakan di Asia.

Selain itu, Sidang Umum juga mengesahkan keanggotaan India dan Kazakstan sebagai *full membership* of APA. Masuknya India dan Kazakstan membuat jumlah anggota APA bertambah menjadi 41 negara. Sidang Pleno ke-5 APA akan diselenggarakan di Suriah pada tahun 2010.

6. Sidang Tahunan ke-18 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), 17 – 22 Januari 2010 di Singapura.

Delegasi terdiri dari

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	F-PKS	Ketua Delegasi,
Sidharto Danusubroto	F-PDIP	Anggota,
Dr. Abdurrahman Abdullah	F-PD	Anggota,
Muhammad Oheo Sinapoy, SE, MBA	F-PG	Anggota,
Ir. Alimin Abdullah	F-PAN	Anggota,
Dra. Hj. Wardatul Asriah	F-PPP	Anggota, dan
Noura Dian Hartarony	F-Gerindra	Anggota.

Sidang dihadiri oleh 134 Anggota Parlemen yang berasal dari 21 Negara Anggota APPF dan satu negara *observer*. Pada sidang kali ini DPR-RI telah mengajukan empat buah rancangan resolusi untuk dibahas dalam sidang bersama 34 rancangan resolusi yang diusulkan oleh negara lain. Keempat rancangan resolusi yang diusulkan DPR adalah tentang: *Promoting Interfaith Dialogue in Preventing Terrorism, The Impact of Global Crisis on Human Security, Natural Disaster Impact on Human Security* dan *Promoting Asia Pacific Youth Dialogue*. Disamping mengusung rancangan resolusi tersebut, Delegasi DPR-RI, atas permintaan Jepang,

telah berperan dalam memperkuat pembahasan rancangan resolusi tentang *Middle East Peace Process* yang diusulkan oleh Jepang dan Cile.

Pada Sidang Tahunan ke-18 APPF Indonesia berhasil memasukkan empat buah rancangan resolusi yang kemudian diadopsi menjadi resolusi APPF sebagai hasil akhir dari sidang bersama 14 resolusi lainnya serta sebuah *Joint-Communique*. Selain itu, Delegasi juga telah mengadakan pertemuan trilateral dengan Delegasi Malaysia dan Brunei Darussalam antara lain menyepakati penggunaan bahasa Indonesia/Melayu pada sidang-sidang APPF dan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi China antara lain membahas isu peningkatan hubungan kedua parlemen, pertukaran pemuda dan isu ekonomi dimana pada kesempatan tersebut Indonesia telah meminta bantuan Parlemen China untuk menghimbau Pemerintahnya agar memberikan kelonggaran waktu bagi Indonesia terkait dengan pelaksanaan pembukaan pasar bebas *ASEAN Free Trade Area+ China*, terutama untuk mengatasi dampak negatif terhadap pengusaha kecil dan menengah, sampai pihak Indonesia benar-benar siap melaksanakan perjanjian tersebut, dan pihak parlemen China menanggapi untuk menindaklanjutinya.

7. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Seminar on “Post Financial-Economic Crisis and the Issue of Sustainable Development: The Role of Parliamentarians”, 7– 10 Maret 2010 di Da Nang, Vietnam.

Anggota Delegasi Indonesia terdiri dari Ferrari Roemawi, MBA (F-PD) sebagai Ketua Delegasi, dan Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. (F-PKS) sebagai Anggota Delegasi. Seminar dihadiri oleh seluruh perwakilan Parlemen ASEAN (kecuali Brunei Darussalam dan Singapura), Sekretaris Jenderal AIPA, dan perwakilan dari World Bank dan Asian Development Bank. Dalam seminar ini dibahas empat agenda topik yaitu: *Overview of the Crisis and its Economic and Social Consequences, Measures to Respond to the Crisis by Governments of ASEAN, Role of Parliaments Responding to the Crisis and its Aftermath*, dan *Challenges Facing Legislative Process to Ensure Sustainable Development Goal in the Post Crisis Period*.

Seminar berlangsung dengan baik dan dinamis mengingat sebagian besar delegasi yang hadir adalah anggota komisi ekonomi dan keuangan dari masing-masing parlemen negara anggota serta institusi keuangan regional dan global seperti ADB dan World Bank. Di akhir Seminar, seluruh peserta menyetujui beberapa elemen rekomendasi antara lain:

- perlunya dilakukan penguatan kebijakan dan koordinasi dari negara anggota dalam penanganan krisis dan proses pemulihan;
- meningkatkan upaya dialog dan pertukaran informasi dalam rangka mengembangkan *legal framework* yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan;
- mendorong peningkatan penggunaan *clean energy* dan efisiensi penggunaannya yang sejalan dengan respon global terhadap isu *climate changes*; serta
- meningkatkan pengawasan atas kebijakan pemerintah dalam memelihara stabilitas makro-ekonomi serta mendorong pembangunan institusi keuangan yang solid guna menjamin kelancaran operasional institusi keuangan dan pasar uang.

8. Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs, 14 – 16 Maret 2010 di Ngerulmud, Republik Palau.

Delegasi Indonesia terdiri dari Ir. H. Muhammad Najib, M.Sc. (F-PAN) sebagai Ketua Delegasi, dan Dr. Ir. H. Arif Budimanta, M.Sc. (F-PDIP) sebagai Anggota Delegasi.

Sidang dihadiri oleh para anggota Parlemen dari tujuh negara anggota APA, yaitu: Bahrain, Federasi Rusia, Indonesia, Iran, Republik Palau, Saudi Arabia, dan Sri Lanka dan membahas sejumlah isu yang dikelompokkan ke dalam tiga *Sub Committee*, yaitu: *Sub Committee Combating Corruption in Asia*, *Sub Committee Challenges and Opportunities of Globalization in Asia*, dan *Sub Committee Achieving Health Equity in Asia*. Sidang ini menghasilkan *Report of the Meeting* dan tiga *Draft Resolusi*, yaitu *Draft Resolution on Combating Corruption in Asia*, *Draft Resolution on Achieving Health Equity in Asia*, dan *Draft Resolution on Challenges and Opportunities of Globalization in Asia*.

Draf-draf Resolusi tersebut mencakup beberapa hal antara lain:

- peran parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan;
- peran pihak swasta dalam upaya meningkatkan *health equity* perlu didukung;
- Parlemen harus siap dengan tantangan krisis finansial global yang berdampak negatif pada upaya peningkatan kualitas kesehatan;
- menyepakati pembentukan *Ad-Hoc Working Group on ICT* sebagai persiapan *Asian Virtual Parliament*;
- menegaskan tekad untuk melanjutkan dialog dan kerjasama dalam upaya mencegah perdagangan narkoba;
- menyambut baik inisiatif dari negara-negara G8 yang melakukan program pengembangan sosial di Afganistan; serta,
- meminta semua negara anggota APA untuk memberikan masukan kepada *Ad-Hoc Working Group* dalam rangka perwujudan *Asian Virtual Parliament*.

Hasil-hasil Sidang ini akan dibahas dalam *Sidang Executive Council* di Jakarta, Indonesia.

9. *The Meeting between ASEAN Heads of State/Government and Parliamentary Representatives of AIPA Members, 6 – 9 April di Hanoi, Vietnam.*

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. dan Ketua BKSAP, Dr. Hidayat Nur Wahid. Pertemuan ini merupakan pertemuan formal pertama para pemimpin negara-negara anggota ASEAN bertemu secara resmi dengan Pimpinan Parlemen *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Pada pertemuan ini, Nguyen Tan Dung, *Chairman of the 16th ASEAN Summit*, meminta agar legislatif dan eksekutif negara-negara anggota ASEAN untuk secara bersama-sama melaksanakan resolusi-resolusi ASEAN dan *ASEAN Charter*. Ditambahkan pula oleh Nguyen Phu Trong, *President of AIPA*, bahwa AIPA akan membantu legislatif di masing-masing negara ASEAN untuk secara efektif melaksanakan resolusi-resolusi yang mencakup sejumlah isu dan AIPA juga akan bekerjasama dengan ASEAN untuk mengintensifkan pertukaran dialog dan

kerjasama untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menghadapi masalah-masalah multilateral seperti perubahan iklim, bencana alam, dan pandemi. Diserukan pula kepada negara-negara anggota AIPA maupun ASEAN untuk mengambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan koordinasi antara AIPA dan ASEAN, yang meliputi terciptanya kondisi hukum yang menguntungkan demi terwujudnya penanda tangan perjanjian dan mempromosikan kesadaran masyarakat, serta kontribusi dari parlemen dan masyarakat untuk pembentukan *ASEAN Community*. Pada konferensi ini, delegasi Indonesia berhasil menguatkan posisi AIPA didepan ASEAN dengan diterimanya usulan parlemen Indonesia agar status AIPA yang dalam *ASEAN Charter* digolongkan sebagai “entity” dikuatkan pemaknaannya sebagai “most important entity”.

10. *The Seventh Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Fact Finding Committee (AIFOCOM-7) to Combat the Drug Menace, 22 - 25 April 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Sidang tersebut dihadiri oleh 41 peserta dari sembilan Parlemen Anggota AIPA yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Delegasi DPR-RI diwakili oleh Dra. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si. (F-HANURA) dan H. Dedi Wahidi, S.Pd. (F-PKB). Sidang ini menghasilkan *Resolution on Facilitating the Implementation of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Resolutions on Preventing and Combating Illegal Drugs and to Improve AIFOCOM Activities* dan *Report of the Meeting of AIFOCOM to Combat the Drug Menace*. Hasil pertemuan ini akan disampaikan pada Sidang Umum ke-31 AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September 2010 di Vietnam.

Resolusi tersebut memuat beberapa hal antara lain:

- mendukung secara aktif pengembangan Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba Tahun 2015 (*Drug Free ASEAN Community by 2015*);
- meminta negara-negara anggota AIPA untuk segera membuat undang-undang yang memberikan skema yang seragam untuk perjanjian ekstradisi multilateral ASEAN (*ASEAN Multilateral Extradition Treaty*);

- meminta AIPA Sekretariat dan para anggota Parlemen untuk membentuk *Task Force* yang akan mempelajari dan membuat rekomendasi tentang bentuk *country report* yang berisikan cara-cara pencegahan dan pemberantasan obat-obatan terlarang; serta
- pengharmonisan sistem undang-undang tentang obat-obatan terlarang di negara-negara ASEAN.

11. Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs, 11 – 14 Mei 2010 di Teheran, Iran.

Sidang dihadiri oleh 16 negara anggota Parlemen APA, yaitu: Afganistan, Bahrain, Bangladesh, India, Indonesia, Irak, Iran, Kamboja, Kuwait, Lebanon, Maladewa, Pakistan, Palestina, Rusia, Suriah, dan Turki. Sidang ini merupakan tindak lanjut hasil Sidang Pleno ke-4 di Bandung, pada tanggal 7 -10 Desember 2009. Dalam Sidang ini, Delegasi RI diwakili oleh Dr. Abdurrahman Abdullah (F-PD) dan Alm. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin (F-PKB).

Sidang ini membahas sejumlah isu yang dikelompokkan kedalam tiga *Sub Committee* dan satu *Ad-Hoc Working Group*, yaitu: *Sub Committee Major Issues of Peace and Security in Asia*; *Sub Committee Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*; *Sub Committee Enhancing Cooperation between APA Member Parliaments and Their Governments in Asia*, serta *Ad-Hoc Working Group on Information and Communication Technology*.

Sidang *Standing Committee on Political Affairs* telah menghasilkan *Report of the Meeting* dan enam Draft Resolusi yang telah diadopsi oleh seluruh peserta untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam Sidang *Executive Council*, yaitu: *Draft Resolution on The Role of Asian Parliaments to Promote a Comprehensive Counter-Terrorism and Occupation Strategy*; *Draft Resolution on Supporting the Rights of Palestinian People*; *Draft Resolution on Reinforcing the Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*; *Draft Resolution on The Necessity of Effective Security Assurance and Denouncing the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons in International Relations*; *Draft Resolution on Measures for Enhancing Cooperation Between APA and Asian Governments*; dan *Draft Resolution Proposed by the Ad-Hoc Working Group on Information and Communication Technology "ICT"*.

12. Sidang APA Sub Committee on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments, 11 – 12 Juni 2010 di Hotel Sultan, Jakarta.

Sidang dihadiri oleh 11 negara anggota APA yakni: Afganistan, Bahrain, Kamboja, Indonesia, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Sri Lanka, Suriah, Thailand (diwakili Kedutaan Besar Thailand di Jakarta), dan Turki; serta perwakilan dari Sekretariat APA di Iran.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI,	Penasehat,
Priyo Budi Santoso	Wakil Ketua DPR-RI,	Koordinator,
Sdr. Sidarto Danusubroto	F-PDIP	Ketua Delegasi,
Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	F-PKS	Anggota,
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	F-PAN	Anggota,
Dr. Abdurrahman Abdullah	F-PD	Anggota,serta
M. Oheo Sinapoy, S.E., MBA	F-PG	Anggota.

Sidang APA Sub Committee ini telah menghasilkan *Report of the Meeting, Draft Resolution on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments* dan *Statement of Sub-Committee on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments on Israeli attack on the Aid Flotilla*. Draf Resolusi ini akan disampaikan pada Sidang APA *Executive Council* yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2010 di Jakarta, untuk kemudian dibahas dalam Sidang Pleno ke-5 yang akan datang di Suriah.

Draft Resolution antara lain memuat:

- mendesak kepada parlemen negara-negara di Asia untuk membentuk arsitektur keuangan global yang baru sebagai cara mengatasi krisis;
- meminta kepada negara-negara anggota APA untuk mendukung misi kemanusiaan untuk merespon krisis di setiap wilayah dan mengangkat blokade ekonomi yang membahayakan kehidupan manusia seperti yang terjadi di Gaza;
- mendesak para anggota parlemen untuk membuat kontribusi besar untuk menjaga stabilitas internasional, kegiatan perdagangan ekonomi dan memelihara keamanan global serta menjaga perdamaian; serta

- meminta Sekretaris Jenderal APA membentuk Panel Ahli untuk melakukan kajian komprehensif dan memberi saran independen untuk *Sub Committee* tentang isu-isu yang dianggap relevan dengan krisis keuangan global.

13. Sidang *Standing Committee APA on Economic and Sustainable Development* yang terdiri dari *Sub Committee on Integrated Energy Market in Asia* dan *Sub Committee on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change and Planting Billions of Trees Throughout Asia*, 16 – 17 Juni 2010 di Moskwa, Rusia.

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ir. Muhammad Nadjib, M.Sc. (F-PAN) dan Ir. Arsyad Juliandi Rachman, MBA (F-PG).

Sidang ini dihadiri oleh anggota parlemen dari 14 negara-negara anggota APA yaitu dari: Afganistan, Bahrain, Bangladesh, China (*Observer*), Iran, Indonesia, Kamboja, Kuwait, Palestina, Rusia, Suriah, Tajikistan, Turki, dan Vietnam.

Sidang ini menghasilkan *Draft Resolution on Integrated Energy Market in Asia* dan *Draft Resolution on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change and Planting Billions of Trees throughout Asia*.

Dalam *Draft Resolution on Integrated Energy Market in Asia* dimuat antara lain bahwa negara-negara anggota APA sepakat untuk membentuk suatu *common/integrated energy market* yang berkelanjutan serta *Asian common fund* yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek yang layak dan relevan untuk meningkatkan efisiensi energi di Asia.

Adapun dalam *Draft Resolution on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change and Planting Billions of Trees throughout Asia* memuat antara lain tentang dorongan kepada negara-negara anggota APA untuk membentuk komisi independen tentang pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di dalam Parlemen masing-masing serta dorongan untuk melakukan pertukaran informasi tentang isu-isu lingkungan di antara negara-negara Asia dan mentransfer teknologi lingkungan.

14. *The 2nd Caucus of The Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), 23 – 24 Juni 2010 di Singapura.*

Sidang diikuti oleh Anggota Parlemen dari sembilan negara anggota ASEAN dan wakil dari Myanmar sebagai *special observer*, Sekretaris Jenderal AIPA serta wakil dari Sekretariat ASEAN. Delegasi DPR-RI diwakili oleh Sdr. Syarif Bastaman (F-PDIP).

Sidang ini menghasilkan *Report of The 2nd Caucus of The Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* yang memuat hasil pembahasan substantif atas tiga agenda utama yakni:

- (1) *Encouraging Clean Energy Initiatives* yang menghasilkan kesepakatan bahwa ASEAN perlu mempertimbangkan upaya harmonisasi undang-undang untuk mendorong inisiatif dan membangun *Clean Energy*.
- (2) *Supporting Multilateral Trading System (MTS)* yang menyepakati perlunya tetap didorong upaya untuk saling bertukar informasi dalam konteks proses perundingan DDA di WTO. Dipahami pula bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi regional (ASEAN) maka diperlukan suatu MTS yang kuat melalui penyelesaian segera *Doha Round*, dengan hasil yang lebih berimbang bagi kepentingan negara berkembang.
- (3) *Consideration of the Status of Implementation of the 30th AIPA General Assembly (GA) Resolutions* yang menyepakati pula bahwa upaya implementasi Resolusi AIPA akan lebih dapat terfasilitasi dengan baik apabila *draft* MOU antara ASEAN dan AIPA segera dapat disahkan pada saat KTT ASEAN ke-17 di Hanoi bulan Oktober 2010.

15. *Sidang APA Sub Committee on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia, 5 – 6 Juli 2010 di Pnom Penh, Kamboja.*

Sidang dihadiri oleh 23 peserta dari sembilan negara yaitu Indonesia, Iran, Kamboja, Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Suriah, dan Vietnam. Delegasi DPR RI terdiri dari Evita Nursanty (F-PDIP) dan Hj. Herlini Amran M.A. (F-PKS).

Sidang tersebut telah menghasilkan *Draft Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia* dan *Report of the Meeting of the Sub Committee on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia* yang akan disampaikan dalam Sidang *Executive Council* dan akan dibahas dalam Sidang Pleno ke-5 APA yang dibahas di Sidang Pleno ke-5 APA pada November 2010 di Suriah.

Draft Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia antara lain memuat:

- mengutuk upaya Israel yang menyerang obyek warisan budaya Palestina terutama di sekitar kota Al-Quds;
- menegaskan niat mendalam untuk mencegah upaya homogenisasi kebudayaan dalam konteks kebudayaan dan pengaruh pesatnya teknologi;
- mendesak seluruh anggota APA untuk meratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan *Cultural Diversity*; serta
- memutuskan untuk membentuk "*Ad Hoc Working Group*" untuk menyiapkan kesepahaman hukum bersama untuk meningkatkan upaya Asia dalam memerangi penyelundupan obyek-obyek budaya di Asia.

16. Sidang Umum ke-31 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Sidang Umum ke-31 AIPA, 19 – 25 September 2010 di Hanoi, Vietnam.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI	Ketua Delegasi,
Drs. Priyo Budi Santoso	Watua DPR-RI	Watua Delegasi,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	F-PKS	Anggota,
Sidharto Danusubroto	F-PDIP	Anggota,
H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.	F-PD	Anggota,
Ida Ria S., SE, AK	F-PD	Anggota,
Anton Sukartono Surato	F-PD	Anggota,
Bobby A. Rizaldi, SE, MBA, CFE	F-PG	Anggota,
Vanda Sarundajang	F-PDIP	Anggota,
Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc	F-PDIP	Anggota,
Drs. Al Muzammil Yusuf	F-PKS	Anggota,
H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.	F-PAN	Anggota,

Dra. Hj. Okky Asokawati, MSi
Agung Jelantik Sanjaya, MA

F-PPP Anggota,
F-Gerindra Anggota.

Sidang yang mengambil tema “**Solidaritas untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi Komunitas ASEAN**” tersebut dihadiri oleh delegasi dari sembilan Parlemen Anggota AIPA dan Myanmar sebagai Peninjau Khusus (*Special Observer*). Sidang Umum ke-31 AIPA juga dihadiri wakil-wakil dari parlemen Australia, China, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Rusia sebagai Peninjau. Sedangkan India dan Wakil Sekjen ASEAN menjadi tamu kehormatan Majelis Nasional Vietnam.

Rangkaian Sidang Umum ke-31 AIPA tersebut terdiri dari Sidang *Women AIPA (WAIPA)*, Komite Eksekutif, Sidang Pleno, Sidang Komisi, dan Sidang dengan negara *observer*. Sidang Komisi dibagi menjadi empat komite yang membahas masalah politik, sosial, ekonomi, dan keorganisasian.

Dalam sidang AIPA ke-31 tersebut, Delegasi DPR-RI telah berhasil mendorong berbagai isu penting untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti AIPA seperti; dorongan agar isu penanganan kejahatan lintas negara seperti pencucian uang, *cybercrimes*, penyalahgunaan obat terlarang dapat didorong dan ditindaklanjuti melalui kerangka regional, antara lain melalui konvensi. Implementasi lebih lanjut terhadap *ASEAN Convention on Counter Terrorism* serta dorongan agar *ASEAN Convention on Trafficking in Person (ACTIP)* maupun *ASEAN Extradition Treaty* dapat segera dibentuk, merupakan salah satu diantaranya. Terkait isu pencucian uang, Delegasi DPR-RI juga menekankan pentingnya standar yang sama dan berbagi informasi mengenai isu tersebut. Delegasi DPR-RI juga berhasil merumuskan paragraf tersendiri dalam salah satu Resolusi AIPA tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran.

17. The Sixth Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) Meeting, 26 – 28 September 2010 di Brussel, Belgia.

Dalam Sidang tersebut hadir delegasi dari 23 mitra *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, yakni Belgia, Bulgaria, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Polandia, Portugis, Rusia, Singapura, Siprus, Slovenia, Spanyol, Thailand, Yunani, dan Parlemen Eropa.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP,
Tantowi Yahya	F-PG,
Adisatrya Suryo Sulisto	F-PDIP, dan
Makmur Hasanuddin, M.A.	F-PKS.

Sidang ASEP-VI ini mengusung tema besar “*Economic Challenges as a Global Opportunity to Promote the Quality of Life of Our Populations*”. Sidang terbagi atas dua panel dengan sub tema yang berbeda. Panel I bertemakan “*Effective Financial and Economic World Governance Structures*”, sementara Panel II membawa tema “*Sustainable Development*”. Dalam panel II tersebut, Delegasi DPR-RI yang diwakili Tantowi Yahya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu *keynote speaker*.

Sidang ASEP-VI telah menghasilkan sebuah deklarasi tentang “*Economic challenges as a global opportunity to promote the quality of life of our populations*” yang terdiri atas 54 butir pernyataan parlemen mitra ASEM. Deklarasi tersebut menjadi salah satu masukan bagi KTT ASEM ke-8, tanggal 4-5 Oktober. Dalam pembahasan Deklarasi ASEP-VI tersebut, Delegasi DPR-RI telah turut ambil bagian dalam *drafting committee* yang merumuskan isi deklarasi, dan berperan aktif menyumbangkan ide-idenya, selain memperjuangkan kepentingan nasional, juga memberikan sumbangan pikiran bagi terciptanya peningkatan hubungan kemitraan dan kerjasama yang lebih efektif dan komprehensif antara kawasan Asia dan Eropa dalam rangka mencapai suatu “*common goals*” yang menjadi kepentingan bersama kedua kawasan. Beberapa hal yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia untuk penyempurnaan deklarasi tersebut antara lain tentang perlunya Asia dan Eropa menciptakan suatu *strategic-partnership* dalam hal *sustainable development* yang komprehensif, setara, dan saling menguntungkan. Dalam pencapaian target MDGs, ASEM diminta untuk segera merealisasikan agenda penghapusan kemiskinan yang didasarkan pada strategi dan kebijakan negara-negara berkembang. Selain itu, menyikapi soal pembajakan di laut, Delegasi Indonesia menegaskan agar ASEP maupun ASEM lebih memfokuskan pada yang terjadi di Somalia dan Teluk Aden karena sudah menjadi ancaman yang berbahaya sejak tiga tahun terakhir.

18. Sidang *Executive Council* Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Sidang *Sub Committee on Alleviating Poverty in Asia*, 12-13 Oktober 2010, di Jakarta

Sidang dihadiri 22 Parlemen Negara anggota APA, yakni: Bahrain, Bangladesh, China, India, Indonesia, Iran, Kamboja, Kuwait, Laos, Lebanon, Maladewa, Pakistan, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Suriah, Tajikistan, Thailand, Turki, Vietnam, dan Yordania, serta Sekretariat APA.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI	Presiden APA Penasehat,
Drs. H. Priyo Budi Santoso	Watu DPR-RI	Koordinator,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid	Ketua BKSAP	Ketua Delegasi,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	F-PD	Anggota,
Sidarto Danusubroto	F-PDIP	Anggota,
Ir. H. Azwar Abubakar, M.M.	F-PAN	Anggota,
Ida Ria Simamora	F-PD	Anggota,
Drs. Helmy Fauzi	F-PDIP	Anggota, dan
H. Ma'mur Hasanuddin	F-PKS	Anggota.

Sidang *Sub Committee on Alleviating Poverty in Asia* yang diselenggarakan sebelum Sidang *Executive Council*, menghasilkan *Report of The Meeting of Sub-Committee on Alleviating Poverty* serta satu draf resolusi yang menegaskan komitmen Parlemen anggota APA untuk memberantas kemiskinan di Asia. Dalam Draf Resolusi ini, anggota APA diminta untuk berperan aktif dalam upaya pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)*.

Sidang *Sub Committee* ini menindaklanjuti *Poverty Alleviation Fund in Asia* serta menyepakati bahwa penjajahan bisa berdampak pada berlangsungnya kemiskinan sehingga berakibat pada terhambatnya pencapaian MDGs. Selain itu, Sidang juga mengemukakan bahwa APA memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas SDM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Asia.

Dalam Sidang *Executive Council*, Sekjen APA menyampaikan tiga Draf Resolusi yang akan dibahas dalam Pleno Ke-5 di Suriah yaitu: *Draft Resolution on Financial Regulation* yang akan dibahas dalam *Standing*

Committee on Economic and Social Development pada tahun 2011, *Draft Resolution on Establishment of Cooperation Between APA and International Conference of Asian Political Parties (ICAPP)* serta *Draft Resolution on Recognizing 14 November as APA the Day*.

Sidang *Executive Council* menghasilkan *Report of the Executive Council Meeting* serta menghasilkan *14 Adopted Draft Resolution* yang dihasilkan dalam sidang-sidang *Sub Committee* sebelumnya, yakni:

- 1) *Draft Resolution on Combating Corruption;*
- 2) *Draft Resolution on Achieving Health Equity in Asia;*
- 3) *Draft Resolution on Challenges and Opportunities of Globalization in Asia;*
- 4) *Draft Resolution on Supporting the Rights of Palestinian People;*
- 5) *Draft Resolution on Reinforcing the Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia;*
- 6) *Draft Resolution on the Role of Asian Parliaments in promoting a Comprehensive Counter Terrorism and Occupation Strategy;*
- 7) *Draft Resolution on Measures for Enhancing Cooperation Between APA and Asian Governments;*
- 8) *Draft Resolution on Information and Communication Technology "ICT";*
- 9) *Draft Resolution on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments;*
- 10) *Draft Resolution on Integrated energy Market in Asia;*
- 11) *Draft Resolution on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change and - Planting Billions of Trees throughout Asia;*
- 12) *Draft Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia;*
- 13) *Draft Resolution on Alleviating Poverty in Asia;* dan
- 14) *Draft Resolution on the Role of Asian Parliaments to Promote a Comprehensive Counter-Terrorism and Occupation Strategy.*

Draft Resolution on the Necessity of Effective Security Assurance and Denouncing the Use or the Threat of Use of Nuclear Weapons in International Relations dibahas dalam Sidang ini. Sidang juga mempertimbangkan sudut pandang dan amandemen yang diusulkan delegasi Rusia terhadap Draft Resolusi ini. Sidang memutuskan untuk mempertimbangkan kembali Draft Resolusi ini pada Sidang *Executive Council* ke-2 bulan November 2010 di Damaskus, Suriah. Adapun terhadap *Draft Resolution on Supporting the Rights of Palestinian People,*

Delegasi Rusia menyampaikan keinginannya mendukung rakyat Palestina, namun begitu menyatakan tidak dapat mendukung Draft Resolusi tersebut.

Sidang juga menerima usulan Delegasi Indonesia agar APA membentuk *Women Coordinating Committee*. Dalam hal ini, Sidang meminta Indonesia untuk menyampaikan nota penjelasan tentang pembentukan komisi dimaksud dalam Sidang *Executive Council* berikutnya di Damaskus, Suriah untuk mendapatkan pengesahan di Sidang Pleno.

Selain itu, mengacu kepada paragraf tiga dari *Draft Resolution on Reinforcing the Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*, di mana APA akan mengadakan konferensi tahun 2011 dengan tema *Friendship and Cooperation in Asia*, Sekjen APA akan mengadakan komunikasi dengan anggota APA untuk meminta kesediaan menjadi tuan rumah konferensi dimaksud. Apabila tidak ada anggota APA yang bersedia menjadi tuan rumah penyelenggara, Indonesia menyatakan bersedia untuk menjadi tuan rumah.



IV. LINGKUP KERJASAMA MULTILATERAL

Dalam lingkup kerjasama multilateral, BKSAP mengirimkan delegasi dimana DPR-RI tergabung dalam organisasi parlemen besar seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC)* dan ke sidang-sidang yang diselenggarakan oleh badan-badan di bawah PBB:

1. ***The Second Meeting of Preparatory Committee for the 3rd World Conference of Speakers of Parliament, 16 – 17 November 2009, di New York, Amerika Serikat.***

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. dan Ketua BKSAP Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.

Konferensi tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan terdahulu dan bertujuan untuk membahas tindak lanjut dari *First Meeting of Preparatory Committee* dengan fokus pada arah bahasan dan harapan capaian dari *World Conference of Speakers of Parliament (WCSP)* yang ke-3, draf Deklarasi dan *Rules of Procedure WCSP* yang ke-3.

Konferensi dihadiri 18 Ketua Parlemen dari kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Afrika. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan di akhir konferensi adalah peningkatan komitmen dari Delegasi Indonesia untuk mendorong IPU menjadi forum Parlemen yang lebih tanggap dan kredibel serta berkontribusi bagi upaya peningkatan perdamaian dan kesejahteraan rakyat diseluruh dunia dan beberapa masukan dari Delegasi Indonesia menjadi bagian dari draf Deklarasi WCSP ke-3. Selain itu yang tidak kalah penting adalah usulan Delegasi Indonesia untuk reformasi Dewan Keamanan PBB dengan perlunya koreksi atas adanya hak veto dan usul representasi keterwakilan dalam Anggota Tetap DK PBB jugapentingnya forum tersebut menghasilkan deklarasi untuk *Copenhagen Summit Meeting* dan *Global Climate Change*, serta dorongan agar hasil *Third World Conference of Speakers of Parliament* memberikan kontribusi terhadap pembahasan *UN Summit* tahun 2010 terutama dalam me-review pencapaian target MDGs pada tahun 2015.

2. *Parliamentary Hearing at the United Nations during the 64th Session of the General Assembly, 19 – 20 November 2009 di New York, Amerika Serikat.*

Delegasi Indonesia terdiri dari:

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Wakil Ketua BKSAP,
Puan Maharani	F-PDIP Anggota, dan
Evita Nursanty	F-PDIP Anggota.

Keikutsertaan Delegasi DPR-RI dalam Sidang ini bertujuan untuk meningkatkan peran DPR-RI dalam upaya mengatasi dampak krisis keuangan global, pangan, energi, dan perubahan iklim baik dalam mempengaruhi kebijakan global maupun kebijakan pemerintah.

Tema yang dibahas dalam *Parliamentary Hearing 2009* adalah “*The Way Forward Building Political Support and Implementation Effective Response to the Global Economic Crisis*” yang dibagi kedalam empat sesi, yaitu:

- a. *Overview of the international responses to the crisis;*
- b. *Delivering a green recovery: solution for more sustainable economy;*
- c. *Addressing overview of the international responses to the crisis the social impact of the crisis: safety nets, public goods, and worker’s rights;*
- d. *Building Greater Transparency and accountability of financial crisis.*

Dalam beberapa sesi, Delegasi Indonesia menekankan upaya mengatasi krisis keuangan dan ekonomi meliputi pemberian stimulus, penguatan sektor perbankan, peningkatan ekspor dan investasi merupakan prioritas dalam mengatasi krisis keuangan global tanpa proteksi yang berlebihan. Selain itu Delegasi Indonesia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai *climate change* harus merujuk pada *Kyoto Protocol* dan *Bali Road Map* yang telah menetapkan target-target yang harus dicapai baik oleh negara berkembang dan utamanya oleh negara maju.

Beberapa kesimpulan yang dibawa dari Sidang tersebut adalah:

- a. Krisis yang dihadapi masih akan berlangsung lama dan akan menjadi lebih buruk apabila negara-negara di dunia tidak

- mengambil langkah-langkah terpadu untuk mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.
- b. Krisis yang terjadi saat ini bersifat multidimensional sebagai akibat krisis global keuangan, pangan, energi, selain juga diperburuk oleh krisis akibat perubahan iklim.
 - c. Mendukung peran G-20 dalam manajemen ekonomi global saat ini dan mendesak untuk mengedepankan kepentingan negara berkembang dan terbelakang.
 - d. IPU diharapkan membangun interaksi yang lebih erat dan terstruktur dengan IMF dan Bank Dunia.

3. *Parliamentary Conference on Maternal and Newborn Health and Survival, "Ensuring Access to Health for All Women and Newborn; the Role of Parliaments", 23 – 25 November 2009 di Kampala, Uganda.*

Konferensi Parlemen tersebut dilaksanakan dalam rangka penguatan upaya pencapaian tujuan MDGs yang ke-5 tentang *Improve Maternal Health* dan MDGs yang ke-4 tentang *Reduce Child Mortality*. Delegasi DPR-RI terdiri dari Ida Ria S, S.E., M.Si. (F-PD) dan Vanda Sarundajang (F-PDIP).

Konferensi dihadiri 117 orang anggota parlemen dari 16 negara, dan organisasi internasional. Peran aktif Delegasi Indonesia dalam Konferensi tersebut antara lain dengan *sharing* pengalaman dengan peserta lain mengenai program-program kesehatan yang telah dilaksanakan di Indonesia, seperti: program KB, Program JAMKESMAS, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masih banyak lagi. Delegasi Indonesia juga menyatakan bahwa perlunya dukungan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan Ibu dan Anak melalui pendanaan bersama yang konsisten secara komitmen dalam pencapaian MDGs setuju untuk membahas masalah HAM tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan hak sipil dan politik saja tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Beberapa kesimpulan hasil konferensi, antara lain:

- a. Tujuan yang harus mendapat prioritas adalah MDGs 4 yaitu, anak-anak yang bertahan hidup dan sehat, dan MDGs 5 yaitu ibu hamil yang sehat.

- b. Para Delegasi menyetujui bahwa tanggung jawab untuk menjamin bahwa masalah ibu hamil dan anak baru lahir menjadi prioritas di negara masing-masing, untuk mencari tindakan proaktif, strategis, *partnership*, koordinasi antaraktor dan harmonisasi tindakan.
- c. Kesepakatan para Delegasi untuk menjamin akses atas layanan kesehatan ibu hamil dan anak baru lahir dengan memfokuskan pada tindakan prioritas seperti masalah: anggaran/perundang-undangan, pengawasan, SDM, pengawasan, kordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan perempuan.

4. *Regional Seminar for the Inter-Parliamentary Union (IPU) Asia Pacific Group* dengan agenda “*Taking Effective Parliamentary Action against HIV and AIDs, 10 – 12 Desember 2009, di Hanoi, Vietnam.*”

Delegasi DPR-RI terdiri dari Dra. Sri Rahayu (F-PDIP) dan Saleh Husin, S.E., M.Si. (F-Hanura). Seminar yang dihadiri 12 negara di kawasan Asia Pasifik dan organisasi internasional menghasilkan kesepakatan untuk mendesak IPU untuk memberikan informasi yang terbaru tentang legislasi dan kebijakan-kebijakan memerangi HIV/AIDS dengan tukar menukar pengalaman atas peran parlemen. Dalam seminar tersebut, Delegasi Indonesia mengingatkan beberapa poin seruan dan resolusi IPU, PBB, dan badan kerjasama internasional untuk mempercepat penggalangan solidaritas, kerjasama, dan dukungan finansial secara global dalam menangani epidemi HIV yang semakin fenomenal khususnya di Asia Pasifik. Selain itu, Delegasi Indonesia menyuarakan perlunya IPU, organisasi internasional, dan LSM internasional terkait untuk mendesak WHO melaksanakan proses pra-kualifikasi secara transparan.

5. *Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference, 16 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ir. M. Najib, M.Sc. (F-PAN) dan KRMT Roy Suryo Notodiprojo(F-PD). Dalam sidang ini, setiap negara peserta –termasuk Indonesia—melaporkan bagaimana kebijakan negara masing-masing dalam upaya mengurangi emisi karbon, sebagian

negara diikuti target-target dengan angka kuantitatif tapi sebagian besar berhenti hanya sampai aspek kualitatif saja. Negara-negara kecil dan kepulauan yang merasa paling menderita akibat perubahan iklim yang menaikkan permukaan laut merasa negara-negara besar penyumbang CO2 harus memberikan kompensasi pada mereka yang merasa menjadi korban. Tuntutan agar negara-negara besar khususnya Amerika dan China untuk memberikan komitmen akan kesediaannya mengurangi kontribusi CO2-nya secara jelas dengan angka yang konkret mendominasi pembicaraan dan diskusi yang berlangsung.

Mayoritas peserta ingin agar kesepakatan Kopenhagen tetap berpijak pada Protokol Kyoto atau merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto sehingga prinsip-prinsip yang dipakai di Protokol Kyoto tetap dihormati, sementara negara-negara maju ingin mengganti dan membuat kesepakatan yang di Kopenhagen berbeda sama sekali. Keputusan atau kesepakatan para Kepala Negara yang mengambang dan tidak konkrit mengecewakan sebagian besar anggota Parlemen yang hadir. Peserta menyadari isu perubahan iklim merupakan domain eksekutif akan tetapi legislatif punya tanggung jawab politis dan tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan sekaligus pengawasan agar komitmen-komitmen Pemerintah terkait upaya menurunkan emisi CO2.

6. *The 6th Session of the Conference and the 12th Session of the Council of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), tanggal 26 – 31 Januari 2010, di Kampala, Uganda.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Wakil Ketua BKSAP,
Sidarto Danusubroto	Wakil Ketua BKSAP,
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	Wakil Ketua BKSAP,
Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.	F-PD, Anggota, dan
Ir. Satya W. Yudha, M.Sc.	F-PG, Anggota.

Dalam Sidang ini, Delegasi DPR-RI membawa misi agar Ketua DPR-RI terpilih sebagai Presiden PUIC dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-7 PUIC, serta untuk menggolkan

kepentingan dan pemikiran Indonesia dalam hasil akhir sidang yaitu dalam Resolusi dan Deklarasi.

Dalam Sidang yang dihadiri oleh 30 Anggota Parlemen dan Organisasi Internasional tersebut, Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M., terpilih sebagai *Vice President of the 6th Conference of the PUIC* dan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. terpilih sebagai Ketua Sidang pertemuan *Standing Specialized Committee on Women, Social and Cultural Affairs*. Selain itu, hasil yang membanggakan adalah Ketua DPR-RI terpilih sebagai *President of the PUIC Conference* untuk periode 2012 – 2014 dan karenanya Indonesia terpilih sebagai Tuan Rumah Konferensi ke-7 PUIC, setelah melakukan lobi yang cukup alot.

Peran aktif Indonesia juga terlihat saat Ketua Delegasi DPR-RI menyampaikan *statement* bahwa pentingnya peran parlemen untuk menciptakan dialog konstruktif antar-berbagai budaya, agama, dan peradaban untuk menghadapi isu Islamophobia yang kian marak, perlunya menerapkan instrumen hukum untuk mencegah dan menghukum pelaku penghinaan terhadap agama sekaligus memajukan pemahaman dan toleransi antarumat beragama.

7. *The 6th Global Forum of the Global Parliamentarians on Habitat (GPH), 18 – 20 Maret 2010 di Rio de Janeiro, Brasil.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Sidarto Danusubroto	Wakil Ketua BKSAP,
Anton Sukartono Surato	F-PD, dan
Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA, CFE	F-PG.

Forum global anggota parlemen ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi peningkatan kerjasama antarpemerintah serta lembaga-lembaga negara, badan internasional, dan lembaga nonpemerintah untuk secara bersama-sama terlibat aktif dalam upaya untuk mengatasi masalah habitat yang sudah mendunia.

Beberapa agenda yang dibahas dalam forum tersebut antara lain *Climate Change, City for All* dan *Urban-Rural Linkages*. Di akhir forum dihasilkan *Declaration of Commitment (Rio Declaration)*. Para delegasi

peserta juga menyatakan kembali dukungannya pada setiap negara dalam penerapan program PBB mengenai perubahan iklim. Selain itu, delegasi peserta juga memberikan beberapa prioritas yang harus diperhatikan dari kerjasama dalam *World Group of Parliamentarians for Habitat*. Prioritas tersebut adalah:

- a. mengidentifikasi agenda habitat di negara masing-masing,
- b. kontribusi dalam konsolidasi terhadap koordinasi dan kolaborasi antara grup wilayah dan dunia,
- c. membangun komunikasi yang efisien dengan teknologi informasi antara para anggota kelompok tingkat dunia dan tingkat wilayah,
- d. mempromosikan pembentukan parlemen nasional untuk habitat.

8. *First Contact Group Meeting of the Parliamentarians for Education in the UNESCO New Delhi Cluster Countries of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka, 24 – 25 Maret 2010 di New Delhi, India.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. Wakil Ketua BKSAP,
Heri Akhmadi F-PDIP, Wakil Ketua Komisi X, dan
Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. F-PAN, Anggota Komisi X.

Kehadiran Delegasi DPR-RI dalam Sidang ini adalah untuk memenuhi undangan UNESCO New Delhi *Cluster Office* di India untuk memberikan *Keynote Address* dari Presiden FASPPED dan presentasi mengenai FASPPED kepada para peserta, serta melobi negara anggota FASPPED khususnya di Asia Selatan untuk hadir dalam Sidang Pleno ke-1 FASPPED di Jakarta, Indonesia.

Dalam pertemuan yang dihadiri 30 peserta dari enam negara dan 20 orang *observer* dari organisasi internasional, perwakilan Indonesia selaku *First President* of FASPPED memberikan pidato yang intinya:

- a. pendidikan adalah kunci bagi pengembangan SDM;
- b. menekankan kembali pentingnya *Education for All (EFA)* yang merupakan kunci pembangunan manusia;
- c. parlemen mempunyai kontribusi yang signifikan untuk pencapaian tujuan EFA yaitu: membuat UU yang mendukung realisasi EFA, mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran.

Selain itu Delegasi Indonesia dan UNESCO Regional Bangkok sepakat mengusulkan sebelum *the 1st FASPPED General Assembly* di Jakarta dapat diadakan satu/dua kali pertemuan semacam *First Contact Group Meeting of South Asia Cluster Countries* atau *Cluster Asia Tenggara*. Sidang menghasilkan *Declaration of New Delhi by the Parliamentarians of the New Delhi Cluster Countries*.

9. *The 122nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meeting, 27 Maret – 2 April 2010 di Bangkok, Thailand.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP Ketua Delegasi,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Wakil Ketua BKSAP, Anggota,
Ir. H. Azam Azman Natawijana	F-PD Anggota,
dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp. KJ	F-PD Anggota,
Drs. Enggartiasto Lukita	F-PG Anggota,
Drs. Helmy Fauzi	F-PDIP Anggota
Syarif Bastaman	F-PDIP Anggota
H. Andi Anzhar Cakra Wijaya	F-PAN Anggota, serta
Luthfi Hasan Ishaq, M.A.	F-PKS Anggota.

Dalam Sidang ini Delegasi menargetkan agar Indonesia dapat menduduki sejumlah posisi yang lowong di IPU dan memasukan kepentingan dan kontribusi Indonesia pada hasil akhir sidang yaitu dalam Resolusi serta menggalang dukungan Delegasi parlemen IPU untuk mendesak Israel agar menghentikan perluasan pemukiman di Jerussalem Timur dan mengecam keras agresi terhadap rakyat Palestina, serta mengusut pelanggaran HAM Israel terhadap anggota parlemen Palestina yang ditahan oleh Israel, dan lebih jauh membebaskan mereka dari Penjara.

Dalam Sidang yang dihadiri 124 Negara Anggota IPU, 4 Associate Member, 41 organisasi peninjau, Ketua Delegasi menyampaikan pernyataan dalam sesi *General Debate* antara lain:

- (1) meningkatkan peran IPU untuk reformasi dan demokratisasi PBB khususnya keanggotaan di Dewan Keamanan PBB dan Hak Veto bagi sebagian anggota tetap DK PBB,

- (2) agar tema Assembly lebih serius ikut menyelesaikan masalah Palestina dan pelanggaran Israel terhadap tanah Palestina dan Masjid Al Aqsa, serta tentang penahanan anggota parlemen Palestina,
- (3) pengalaman Indonesia dalam natural disaster dan kepedulian serta solidaritas Indonesia terhadap negara-negara yang mengalami bencana.

Selain itu, dalam *Committee on Middle East Question*, Luthfi Hasan Ishaq, M.A. sebagai Titular Member dengan *statementnya* mendesak agar Israel menghentikan pendudukan selama lebih dari 40 tahun.

Delegasi DPR-RI juga mengadakan pertemuan bilateral antara lain dengan Turki, Australia, Belanda, pertemuan dengan anggota parlemen perempuan dari negara ASEAN + 3, serta dengan pertemuan APA Troika (Indonesia, Iran, dan Suriah). Selain itu, Ketua Delegasi DPR-RI, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. mendapat kehormatan untuk memimpin pertemuan APA dan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. duduk sebagai *drafting committee* untuk pembahasan resolusi di *Second Standing Committee* dan di *Emergency Item Committee*.

Untuk jabatan di IPU Indonesia berhasil menempatkan dua Anggota DPR-RI yaitu:

- a. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., sebagai *1st Vice President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians*
- b. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H. sebagai anggota tetap *Committee on Promoting the International Humanitarians Law*

10. *The Second Open-Ended Extraordinary Meeting of the Excom of PUIC, 9 – 10 Mei 2010 di Istambul, Turki.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD). Adapun maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas pembangunan pemukiman baru Israel di tanah Palestina sehingga diperlukan tindakan untuk melindungi dan menyelamatkan Palestina khususnya masjid Al Aqsa dan tempat bersejarah Islam lainnya dari aksi Israel.

Dalam pertemuan yang dihadiri wakil dari 29 negara, dan dihadiri oleh 16 *Speaker/Vice Speakers* serta 10 *observers*, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. merupakan satu-satunya anggota parlemen perempuan dalam *committee* tersebut diterima usulannya dalam *drafting* mengenai mendorong UNESCO untuk melindungi masjid Al Aqsa, sebagai warisan budaya dunia. Di sela-sela pertemuan, Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral antara lain dengan Ketua Parlemen Turki, Ketua Parlemen Iran, Sekjen APA, dan Ketua Parlemen Suriah.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

- a. Meminta Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Israel mematuhi *the Fourth Geneva Convention* dan *Haque Agreement* serta peraturan internasional tentang kedaulatan negara Palestina.
- b. Mendorong Umat Islam dan Kristen diseluruh dunia untuk bersama-sama melindungi Jerussalem dan tempat bersejarah lainnya dari yahudisasi.
- c. Mengingatkan Israel bahwa pembangunan pemukiman baru akan memicu konflik kawasan yang selanjutnya mengganggu perdamaian dunia.

11. *The 2nd Executive Bureau Meeting of the Forum Asia Pacific Parliamentarian for Education (FASPPED), 23 – 24 Mei 2010 di Seoul, Korea Selatan.*

Delegasi DPR-RI diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD) dan Wakil Ketua Komisi X, Heri Akhmadi (F-PDIP). Pertemuan ini diadakan untuk mempersiapkan Sidang Umum Pertama FASPPED yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 Juli 2010 di Jakarta.

Dalam pertemuan yang dihadiri anggota parlemen dari delapan negara dan perwakilan Organisasi Internasional, Heri Akhmadi mewakili Delegasi DPR-RI menyampaikan presentasi dengan tema *The Indonesia Way of Achieving Education for All (Target 2 of MDGs)*. Selain itu pertemuan juga membahas mengenai jabatan Presiden FASPPED dimana Delegasi Korea Selatan mengajukan usulan pembahasan penggantian Presiden FASPPED dengan alasan Ketua DPR-RI yang

lama, HR Agung Laksono, tidak lagi menjadi anggota parlemen, dimana usulan tersebut didukung oleh Samoa, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Thailand. Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pemilihan Presiden FASPPED adalah atas nama negara bukan perorangan, Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan presidensi sampai dengan tahun 2012. Pertemuan juga menyambut baik terhadap Samoa untuk menjadi tuan rumah *workshop* FASPPED pada bulan Juni 2011.

12. *The Second Preparatory Meeting of the Development Cooperation Forum (DCF) of the United Nations, 3 – 4 Juni 2010 di Helsinki, Finlandia.*

Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. F-PD, sebagai the 1st Vice President of IPU Women Coordinating Committee diundang untuk memimpin salah satu sesi. Maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan arti penting dalam mempromosikan persamaan hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita.

Dalam pertemuan ini Indonesia menyampaikan *statement* dalam subtopik “*The Impact of Development Cooperation in Reaching the MDGs on Gender Equality: Challenge and Solution*”. Delegasi Indonesia mengatakan bahwa suatu kebanggaan bagi Indonesia dapat ikut memberikan kontribusi dalam realisasi kebijakan persamaan gender di Indonesia, ini adalah bukti bahwa perkembangan gender Indonesia diakui dunia. Dalam bidang politik, peran perempuan DPR-RI mengalami peningkatan signifikan karena keterwakilan perempuan di tiap partai politik sebesar 30 persen.

13. Kunjungan Ketua DPR-RI dan Delegasi BKSAP DPR-RI dalam rangka melaksanakan Misi sebagai *President of Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan *Vice President of Council of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* ke Republik Islam Turki dan Republik Islam Iran, serta *APA Troika Meeting*, tanggal 26 Juni – 2 Juli 2010 di Teheran.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP,
Sidarto Danusubroto	Wakil Ketua BKSAP,
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	Wakil Ketua BKSAP,
Ir. H. Azam Azman Natawijana	F-PD, Anggota BKSAP,
Adi Sukemi S.T., M.M.	F-PG, Anggota BKSAP.

Kunjungan ini adalah dalam rangka melaksanakan misi Ketua DPR-RI sebagai *President of Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan *Vice President of Council of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, dan melakukan kunjungan Bilateral ke Republik Turki dan Republik Islam Iran, serta menghadiri *APA Troika Meeting* di Teheran, Iran.

Dalam kunjungan ini, Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. dan Ketua Parlemen Turki, H.E. Mehmet Ali Sahin menandatangani MoU mengenai penguatan hubungan bilateral dan peningkatan kerjasama Indonesia – Turki serta penguatan demokrasi di kedua negara yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, Delegasi DPR-RI menandatangani *Joint Communiqué* dengan Parlemen Iran. Pertemuan dengan Parlemen Iran juga membahas hubungan teknologi, kematangan demokrasi, pendidikan, dan ekonomi. Dalam masalah nuklir Delegasi Indonesia menyatakan bahwa teknologi nuklir merupakan suatu tuntutan bersama sebagai energi alternatif, ketika minyak semakin menipis, nuklir dapat menjadi alternatif meski hal itu kontroversial di dunia, akan tetapi nuklir sebagai pengetahuan harus digali. Delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Ahmaddinejad, dan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani. Dan pada tanggal 1 Juni 2010 Delegasi DPR-RI juga mengadakan *Asian Parliamentary Assembly (APA) Troika Meeting* yang diikuti oleh Ketua Parlemen Iran, Ketua Parlemen Suriah, dan Ketua DPR-RI, yang membahas masalah konflik Israel – Palestina dan mengakhiri blokade terhadap Gaza dan tuntutan atas kejahatan Israel terhadap misi kemanusiaan Kapal Maxi Marmara.

14. *The Extraordinary Executive Committee Meeting of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), 20 – 21 Juni 2009 di Dubai, Uni Emirat Arab.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS) dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD). Pertemuan diadakan dalam rangka mempersiapkan pertemuan-pertemuan mendatang PUIC dan amandemen Statuta PUIC. Usulan Delegasi Indonesia berhasil diterima untuk memperkuat PUIC yaitu dengan memberikan kesempatan parlemen yang ada minoritas muslimnya sebagai *observer* di PUIC. untuk mencari cara terbaik mengatasi krisis stabilitas, pembangunan, dan masa depan umat Islam. Pertemuan luar biasa ini juga menyetujui melalui *walk out* delegasi Iran untuk membentuk suatu tim penyelesaian masalah sengketa antaranggota PUIC.

Pertemuan dihadiri oleh sembilan negara yaitu Mesir, Aljazair, Saudi Arabia, Indonesia, Uganda, Turki, Iran, Kamerun, dan Burkina Faso serta perwakilan dari organisasi internasional. Dalam pertemuan ini Delegasi DPR-RI menyampaikan *statement* bahwa program reformasi undang-undang PUIC merupakan awal sebuah tekad untuk mengaktifkan peran PUIC dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Islam berdasarkan solidaritas dan kerjasama dari negara-negara Islam dan masyarakat untuk mengatasi semua krisis dan hal-hal yang menghambat kemajuan PUIC.

Pertemuan juga menghasilkan seruan dari negara-negara peserta kepada negara-negara anggota OKI, Liga negara-negara Arab, dan Gerakan Non-Blok (NAM) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan pertemuan luar biasa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi baru yang lebih tegas untuk menghentikan agresi Israel dan pelaksanaan gencatan senjata. Serta menyepakati pembentukan sebuah komisi internasional yang netral untuk penyelidikan pelanggaran-pelanggaran atas tragedi kapal Mavi Marmara.

15. *The 23rd Meeting of the Executive Committee of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference* dengan tema *Lifting the Unjust Blockade off Gaza*, 28 – 30 Juni 2010 di Damaskus, Republik Arab Suriah.

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. dan Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. Pertemuan ini adalah untuk membahas isu-isu terkait tragedi kapal Mavi Marmara yang akan menuju Jalur Gaza, dan meminta agresi militer Israel terhadap warga Palestina dihentikan.

Dalam pertemuan ini, Ketua Delegasi, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M., sebagai Wakil Ketua *PUIC Council*, mendapat kepercayaan untuk memimpin Sidang *23rd Meeting of the Executive Committee of the PUIC*. Delegasi DPR-RI menyampaikan *statement* mendesak Israel untuk menghentikan segera blokade di Jalur Gaza dan membuka akses masuk bantuan kemanusiaan, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan Resolusi baru yang lebih tegas untuk menghentikan agresi Israel. Sebelum mengikuti pertemuan ini, Delegasi juga berhasil memasuki Jalur Gaza dan menyaksikan secara langsung penderitaan warga Palestina akibat blokade Israel. Selain itu, Delegasi Indonesia mendesak untuk pengusutan tragedi kapal Mavi Marmara dan membentuk Komisi Internasional penyelidikan terhadap tragedi Kapal Mavi Marmara serta memberikan sanksi internasional yang keras terhadap Israel. *Statement* Ketua Delegasi Indonesia terkait dengan pentingnya prakarsa Parlemen Indonesia memasuki Gaza sebagai bentuk konkret upaya membuka isolasi terhadap Gaza, agar ditindaklanjuti oleh pimpinan parlemen OUIIC, disambut baik dan menjadi satu resolusi yang disepakati agar PUIC memaksimalkan kebersamaan sikap antara Hamas dan Fatas terkait blokade terhadap Gaza.

16. Sidang Pleno ke-1 *Forum Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)*, 6 – 7 Juli 2010 di Jakarta, Indonesia.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.	Ketua DPR-RI	Ketua Delegasi,
Drs. H. Priyo Budi Santoso	Watuwa DPR-RI	Koordinator,

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP Anggota,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Watua BKSAP Anggota,
Sidarto Danusubroto	Watua BKSAP Anggota
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	Watua BKSAP Anggota
Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.OG	Ketua Kom X Anggota,
Heri Akhmadi	Watua Kom X Anggota.

Sidang Pleno ke-1 *Forum Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)* dihadiri kurang lebih sekitar 81 peserta, antara lain 27 Negara Anggota FASPPED (Afganistan, Thailand, Bangladesh, Filipina, Bhutan, Kepulauan Marshall, India, Iran, Malaysia, PNG, Timor Leste, Korea Selatan, Mikronesia, China, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Pakistan, Vietnam, Kambojia, Kiribati, Laos, Maladewa, Myanmar, Nepal, Samoa, Tuvalu, Vanuatu), dan enam *partner organization* (UNESCO, UNDP, UNICEF, WORLD BANK, FARPED, dan FAPED).

Sidang Pleno ke-1 FASPPED berlangsung selama dua hari. Pada Sidang Pleno hari pertama yang berlangsung pada tanggal 6 Juli 2010 diisi dengan agenda Sidang Kerja antara lain:

- a. *Report of FASPPED Activities since 2008*
- b. *Issues and challenges in achieving EFA in the Asia Pacific region*
- c. *Strengthening partnership for inclusive education in the framework of EFA: panel discussion led by UNESCO*
- d. *Presentation by the Parliamentarian participant*
- e. *Overview of the Forum of Arab Parliamentarians for Education (FARPED).*

Dalam setiap agenda tersebut diisi dengan presentasi antara lain oleh Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. sebagai Presiden FASPPED, Mr Young-Jin Kim yang merupakan Wakil Presiden FASPPED, Dr. Gwang-Jo Kim, Direktur UNESCO Bangkok Office, Ms. Mae Chu Chang dari World Bank, Mr. El-Mostafa Benlamlih dari UNDP Jakarta dan Mr. Jiyono dari UNICEF (*Education Specialist*). Selain itu, Presiden FARPED, Dr. Ahmed Ben Saad Al Mofareh (Saudi Arabia) juga menyampaikan presentasi dan *sharing* pengalaman FARPED dalam membantu pencapaian *Education for All* di negara-negara Arab.

Hari kedua Sidang Pleno ke-1 FASPPED pada tanggal 7 Juli 2010 diisi dengan agenda Sidang Kerja antara lain:

- a. *Local and national effort for EFA,*
- b. *FASPPED Action Plan 2010 – 2011,*
- c. *FASPPED Statutory documents.*

Dalam agenda Sidang Kerja *Local and National Effort for EFA*, Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Program Indonesia Pintar) menyampaikan presentasi dengan tema “*Indonesia Smart Program in Achieving EFA Goals*”.

Sidang Pleno ke-1 FASPPED berhasil mengesahkan Statuta yang telah diamandemen dimana diantaranya menyetujui usulan Indonesia untuk memperkuat kedudukan FASPPED, serta menghasilkan *Jakarta Action Plan* dengan usulan Indonesia yang berhasil dimasukkan dalam *Action Plan* tersebut, yaitu:

- mendorong agar parlemen-parlemen di negara Asia Pasifik mempunyai komisi pendidikan seperti halnya Komisi X di DPR-RI;
- mendorong pencapaian *EFA (Education for All)*, pendidikan untuk semua kalangan untuk rakyat bangsa-bangsa di Asia Pasifik;
- mendorong legislasi untuk mendukung guru-guru di daerah perdesaan;
- mendesak parlemen Asia Pasifik untuk mengalokasikan anggaran yang agresif bagi pembangunan pendidikan dalam budget nasional.

17. *The Third World Conference of Speakers of Parliament, 19 – 21 Juli 2010 di Jenewa, Swiss.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M.,	Ketua DPR-RI,
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.	Ketua BKSAP,
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Wakil Ketua BKSAP,
Dodi Reza Alex Noerdin, Lic Econ, MBA	F-PG, Anggota BKSAP,
Evita Nursanty	F-PDIP, Anggota BKSAP,
Ahmad Mumtaz Rais, S.E.	F-PAN, Anggota BKSAP.

Selain memberikan kontribusi atas agenda dan tema yang dibahas dalam Sidang *The Third World Conference of Speakers of Parliament*, Delegasi DPR-RI melakukan *bilateral meeting* guna mengakomodir kepentingan dan mencapai tujuan nasional RI, serta melanjutkan diplomasi yang telah dirintis oleh Parlemen Indonesia untuk mengakhiri blokade terhadap Gaza.

Sidang dihadiri 150 Ketua Parlemen negara-negara anggota dan non-anggota *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, 5 *Associate Members*, 13 organisasi peninjau, dan 17 organisasi internasional. Agenda yang dibahas pada sidang adalah:

- a. *Adoption of the Agenda and rule of the conference;*
- b. *Presentation of report on progress since 2005 Speakers Conference:*
 - i. *Meeting the MDGs;*
 - ii. *Building Global Standards for Democratic Parliaments;*
 - iii. *Strengthening the IPU and its relationship with the UN;*
- c. *General Debate: parliaments in a world of crisis; securing global democratic accountability for the common good;*
- d. *Presentation of report on the Sixth Meeting of Women Speakers of Parliaments;*
- e. *Presentation of report from the panel discussion:*
 - i. *Countdown to 2015; keeping our collective promise on the MDGs;*
 - ii. *Strengthening trust between parliament and the people.*

Di Sidang ini, Ketua DPR dalam *statementnya* menyatakan beberapa hal, antara lain:

- a. Indonesia merupakan negara yang berhasil membangun negara demokrasi yang dinamis dan stabil dimana Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berjalan beriringan.
- b. Indonesia mendukung penuh agar parlemen dapat berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas demokrasi global ditengah situasi krisis dengan meningkatkan peran dan keterlibatan parlemen dalam mengatasi masalah-masalah global baik ditingkat nasional maupun internasional.

Selain itu Delegasi juga berhasil melakukan kesepakatan kerjasama bilateral dengan Ketua-Ketua Parlemen antara lain Suriah, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Sudan, Timor Leste, Belanda, Kuba, dan Komoro. Beberapa hasil dari serangkaian pertemuan bilateral antara lain:

- a. Untuk segera mewujudkan rencana kunjungan Ketua Parlemen negara-negara PUIC ke Jalur Gaza dalam upaya untuk mengakhiri Blokade Israel atas Jalur Gaza
- b. Delegasi Indonesia menyampaikan permintaan dukungan atas pencalonan Dr. Indroyono Soesilo sebagai DIRJEN FAO periode 2012 – 2015.

Dalam persiapan sidang ini, Ketua DPR-RI terpilih sebagai salah satu dari 20 anggota yang dipilih oleh Presiden IPU menjadi anggota *Preparatory Committee* yang bertugas menyiapkan tema, program, dan agenda serta draf deklarasi. *Preparatory Committee* akhirnya memutuskan menolak tambahan amandemen dan hanya menambah usulan mengenai terorisme.

18. G-20 Speakers' Consultation, 2 – 5 September 2010 di Ottawa, Kanada.

Delegasi DPR-RI terdiri dari Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. dan Anggota BKSAP, Ir. H. Azam Azman Natawijana (F-PD). Pertemuan ini merupakan inisiatif Ketua Senat Kanada yang melibatkan Ketua-Ketua Parlemen dari negara G-20 yang bertujuan agar parlemen dapat memberikan masukan-masukan atas tema yang dibahas kepada pemerintah serta mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan komitmen mereka pada saat KTT G-20 dan diharapkan adanya kebersamaan pemerintah dan parlemen dalam mencapai tujuannya.

Pertemuan dihadiri oleh 233 peserta yang terdiri dari tujuh Ketua Parlemen, delapan Wakil Ketua Parlemen dan perwakilan dari parlemen Anggota G-20 di Kanada. Pertemuan dibuka oleh tuan rumah Ketua Senat Kanada Mr. Noel A. Kinsella yang menyatakan posisi parlemen sebagai mitra eksekutif dapat memberikan perspektif berbeda dalam isu *food security* mengingat keterkaitan isu *food security* dengan isu lain seperti *climate change*, infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, serta konflik perlu pendekatan yang menyeluruh dalam membahasnya.

Dalam pertemuan ini, Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menyampaikan presentasi yang berjudul "Paradigma Baru untuk Perdamaian dan Ketahanan Pangan." Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan sbb:

- a. Menghimbau kepada Pemimpin G-20 untuk memberikan peran dan keterlibatan yang lebih kepada para petani dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pembangunan pertanian nasional.
- b. Indonesia menawarkan konsep “Panca Yasa” yang didasarkan pada pembangunan berbagai infrastruktur pertanian, pemberdayaan kelompok petani, peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi pertanian, serta mengembangkan dukungan finansial bagi kalangan petani.
- c. Indonesia merekomendasi agar masyarakat internasional memperbolehkan negara-negara berkembang untuk melindungi produk-produk kunci pertanian dan ketahanan pangan nasional dari liberalisasi pasar.

Para delegasi Peserta G-20 juga sepakat untuk mendorong agar pertemuan G-20 menjadi pertemuan yang rutin dan Ketua Parlemen Republik Korea Selatan mempertimbangkan akan menyelenggarakan Pertemuan *G-20 Speakers’ Consultation* kedua yang diindikasikan diselenggarakan pada tahun 2011 setelah KTT G-20 di Seoul pada bulan November 2010. Korea Selatan pada saat ini menjabat sebagai Ketua G-20.

19. *The 65th High-Level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals* atau disebut *United Nations Summit on MDGs, 20 – 22 September 2010 di New York, Amerika Serikat.*

Delegasi DPR-RI terdiri dari Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. dan Anggota BKSAP, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA (F-PG).

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dilaksanakan untuk melakukan review terhadap pencapaian masing-masing negara dan melihat perkembangan yang telah dicapai terhadap pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Sidang dilaksanakan dalam format *roundtable* yang membahas berbagai agenda yaitu *Addressing the Challenge of Poverty, Hunger dan Gender Equality, Meeting the Goals of Health and Education, Promoting Sustainable Development, Addressing Emerging Issues and Evolving Approaches, Addressing the Special Needs of the most Vulnerable, dan Widening and Strengthening Partnerships.*

Dalam Sidang tersebut, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. yang menjabat sebagai *First Vice President of IPU Coordinating Committee of Women Parliamentarians* berkesempatan duduk bersama dengan Sekjen IPU, Mr. Anders Johnsson, dalam *Roundtable 5* yang membahas agenda *Addressing the Special Needs of the Most Vulnerable*. Selain itu Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. juga mengajukan keberatan pada pembahasan mengenai *Analytical Study of Parliamentary Mechanism for MDGs* yang ditulis oleh Pejabat IPU saat berkunjung ke Jakarta. Dalam studi analisis tersebut dinyatakan bahwa Keanggotaan Panja MDGs BKSAP perlu untuk diperkuat dan didukung dalam upaya mengengahkan kepedulian Anggota akan isu MDGs.

The 65th High-Level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals atau disebut *United Nations Summit on MDGs* juga menghasilkan resolusi terkait dengan MDGs.

20. The 123rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings, 1 – 8 Oktober 2010 di Jenewa, Swiss.

Delegasi DPR-RI terdiri dari:

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Wakil Ketua BKSAP,
Ir. Muhammad Najib, M.Sc.	Wakil Ketua BKSAP,
Max Sopacua	F-PD Anggota,
Ferrari Roemawi, MBA	F-PD Anggota,
Drs. Enggartiasto Lukita	F-PG Anggota, dan
Drs. Helmy Fauzy	F-PDIP Anggota.

Sidang tahunan IPU dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antarparlemen dan membahas masalah-masalah yang dihadapi di dunia internasional melalui sidang parlemen sedunia.

Pertemuan dihadiri oleh 118 negara anggota IPU dengan 22 negara diantaranya dipimpin Ketua Parlemen, 39 negara dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen dan 148 anggota Parlemen wanita. Agenda yang dibahas pada *The 123rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings* (agenda dimaksud akan menjadi *subject item* pada Sidang ke-124 IPU di Panama bulan April 2011) sebagai berikut:

- a. *Providing a sound legislative framework aimed at preventing electoral violence, improving election monitoring and ensuring the smooth transition of power (First Standing Committee)*
- b. *The role of parliaments in ensuring sustainable development through the management of natural resources, agricultural production and demographic change (Second Standing Committee)*
- c. *Transparency and accountability in the funding of political parties and election campaigns (Third Standing Committee)*

Dalam Sidang ini, Ketua Delegasi DPR-RI, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. mendapat kepercayaan untuk memimpin Sidang Pertemuan *Asia Parliamentary Assembly (APA)* dan *Committee on the UN Affairs* serta memberikan presentasi mengenai *IPU Report on MDGs*. Selain itu juga memimpin *Eight Information Seminar on Parliaments and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Dalam pertemuan *Coordinating Committee of the Meeting of Women Parliamentarians* Ketua Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi dan peran perempuan di seluruh kegiatan Parlemen termasuk IPU, dan dalam kapasitasnya sebagai *Vice President of Coordinating Committee of the Meeting of Women Parliamentarians* telah memimpin sesi pembahasan *Millennium Development Goals (MDGs)*.

Dalam Sidang *Committee on Middle East Question*, Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya komite mengkaji ulang metoda kerja sehingga dapat bekerja efektif dalam upaya membantu proses perdamaian di kawasan tersebut. Delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral, diantaranya dengan Malaysia, China, Jepang, India, Nigeria, dan Inggris. Sidang juga memutuskan Indonesia akan menjadi Ketua Asia Pasifik Group pada tahun 2011.

The 123rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings, juga menghasilkan sebuah Resolusi *Emergency Item* berjudul *Immediate Action to Support International Relief Efforts in Responce to Natural Disaster, in Particular with regard to Flood-Stricken Pakistan* dan rancangan Resolusi mengenai *Cooperation between the United Nations, National Parliament and the IPU* yang akan diajukan di SIUM PBB ke-65 bulan November 2010.

21. *The 24th Meeting of the Executive Committee of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), 24 Oktober 2010, Abu Dhabi, UAE.*

Delegasi DPR-RI diwakili oleh Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. sebagai anggota *Executive Committee PUIC*. Sidang *Executive Committee* ke-24 PUIC dilaksanakan untuk membahas program-program PUIC yang akan datang termasuk penentuan tanggal dan program Konferensi PUIC pada tahun 2012 di Indonesia. Sidang menyepakati tanggal Sidang dan Konferensi PUIC di Indonesia pada tanggal 24 Januari – 31 Januari 2012 dan menyetujui *Draft Agenda 13th Session of the PUIC Council* di Abu Dhabi, tanggal 15 – 18 Januari 2011.

Usulan Indonesia untuk mengefektifkan sidang-sidang konferensi PUIC dengan memusatkan agenda dan memfokuskan temanya disetujui oleh Sidang. Selain itu Sidang juga menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang intinya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh organisasi internasional dan regional serta kekuatan-keuatan dunia yang berpengaruh agar secara bersama-sama memikul tanggung jawab secara internasional dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan tahan lama bagi konflik Arab-Israel sesuai dengan resolusi-resolusi DK PBB yang terkait.

22. *Parliamentary Hearing at UN General Assembly, 2 – 3 Desember 2010 di New York, Amerika Serikat*

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ir. H. Azwar Abubakar, M.M., Wakil Ketua BKSAP, dengan Anggota Delegasi adalah Puan Maharani dan Evita Nursanty dari F PDIP. Pada pertemuan tahunan anggota parlemen yang diselenggarakan bersamaan dengan Sidang Umum PBB ini, dibahas tema *Towards economic recovery: rethinking development, retooling global governance*.

Delegasi Indonesia dalam *annual hearing* ini menyatakan perlunya masalah stimulus tambahan khususnya bagi negara berkembang yang masih sangat dibutuhkan dan perlunya solusi dukungan pemulihan ekonomi global tanpa menambah beban hutang negara. Delegasi juga

menekankan agar peran PBB lebih diberdayakan dalam menjembati koordinasi antara G-20 dan negara-negara anggota UN dalam penetapan kebijakan ekonomi di tingkat global.

Beberapa masukan yang diperoleh dari *hearing* ini adalah usulan bahwa kebijakan mengenai pajak jangka pendek dianggap langkah spekulatif terbaik yang dapat diterima oleh sebagian besar negara karena pajak dapat menyediakan sumber pembiayaan yang stabil untuk pembangunan. Selain itu, dalam kaitan dengan lingkungan hidup, forum tersebut mengingatkan bahwa Anggota Parlemen dalam hal ini berperan besar dalam menetapkan undang-undang yang dapat membantu merubah perilaku publik agar lebih menyadari bahwa perilaku mereka akan sangat berpengaruh pula kepada lingkungan sekitarnya.

Selain menghadiri berbagai sidang, dalam kerangka kerjasama multilateral di dalam negeri juga diselenggarakan beberapa kegiatan yaitu:

1. *Parliaments Stand Up for Millennium Development Goals (MDGs) atau 'DPR Beraksi dan Bertindak untuk Tujuan Pembangunan Millenium', 17 September 2010, di Operation Room Gedung DPR-RI.*

Event ini diselenggarakan dengan mengundang selain Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Fraksi/Komisi, dan Badan DPR-RI, perwakilan kementerian terkait, juga organisasi internasional di Jakarta dan media masa, sesuai dengan komitmen DPR-RI untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemenuhan Tujuan Pembangunan Millenium atau MDGs yang telah dideklarasikan 189 Kepala Negara termasuk pemimpin Indonesia.

Ketua DPR-RI dalam pernyataannya menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah naik kelas dimana Indonesia telah bergabung pada kelompok negara dengan berpenghasilan menengah, Indonesia juga tergabung dalam Kelompok G-20, juga penggagas utama kerjasama Selatan-Selatan sejak 55 tahun lalu lewat Konferensi Asia Afrika yang memperkuat rasa percaya diri sejumlah bangsa untuk merdeka lepas dari kolonialisasi.

Dalam *statement* lain dikatakan bahwa tahun 2010 musuh utama dunia adalah kemiskinan dan Indonesia harus berperan aktif memerangi pemiskinan. Pemerintah sudah meletakkan wacana MDGs sebagai salah satu prioritas sasaran pembangunan. Dengan komitmen yang sama kuat, DPR akan menjadi mitra sinergis pemerintah serta pihak-pihak lain termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media.

Acara ditutup dengan peniupan peluit sebagai tanda DPR harus bangkit untuk mencapai tujuan MDGs ditandai juga dengan penandatanganan *banner* oleh Ketua DPR-RI, utusan khusus Presiden bidang MDGs, Ketua Panja MDGs, Ketua BKSAP, dan para peserta dialog.

2. Menyelenggarakan acara peringatan *International Day Against Violence on Women* yang jatuh pada tanggal 25 November 2010.

Setelah Rapat Paripurna tanggal 22 November 2010, lebih dari 300 Anggota DPR menandatangani spanduk sebagai pernyataan DPR untuk komitmennya menjadi jangkar dalam upaya peningkatan kemitraan nasional dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Aksi dan komitmen DPR-RI ini merupakan bagian dari kampanye global parlemen berbagai negara untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. *Inter-Parliamentary Union* (IPU) sebagai organisasi yang menaungi parlemen dari berbagai negara di dunia, menghimbau agar parlemen memiliki suatu sikap dan tindakan nyata mengenai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Seratus lima puluh parlemen anggota IPU turut ambil bagian dalam kampanye global ini. Untuk tahun ini, IPU menetapkan tema *Membangun Kemitraan* sebagai tema peringatan. Hal ini dilakukan karena diperlukan keterlibatan semua pihak dan perubahan mentalitas serta opini publik di masyarakat untuk menghapuskan kekerasan dengan bias gender. Kegiatan ini disambut baik oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI dan mendapat perhatian yang positif dari media.



V. PENYELENGGARAAN SIDANG REGIONAL DAN MULTILATERAL DI INDONESIA

1. Sidang *the Fourth Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly (APA)* pada tanggal 7 – 10 Desember 2009 di Bandung, Indonesia, yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 29 negara, dua negara peninjau, dan tiga organisasi parlemen yaitu: Arab *Inter Parliamentary Union (AIPU)*, *Parliamentary Union of OIC Member State (PUIC)*, serta *Inter-Parliamentary Assembly of the Euroasian Economic Community*.
2. Sidang *APA Sub Committee on Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member of Parliaments* telah diselenggarakan pada tanggal 11 – 12 Juni 2010 di Hotel Sultan, Jakarta. Sidang dihadiri oleh 11 negara anggota APA.
3. Sidang Pleno ke-1 *Forum Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)* secara resmi dibuka oleh Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M. pada tanggal 6 Juli 2010 di Hotel Sultan, Jakarta dan dihadiri perwakilan dari 27 Negara Anggota FASPPED dan *partner organization* (UNESCO, UNDP, UNICEF, WORLD BANK, FARPED, FAPED).
4. Sidang *Executive Council Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan Sidang *Sub Committee on Alleviating Poverty in Asia*. Kedua Sidang tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 – 13 Oktober 2010. Sidang dihadiri 22 Parlemen Negara anggota APA.

VI. PANJA BENTUKAN BKSAP

BKSAP menyadari pentingnya pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Tercapainya MDGs, terutama yang terkait dengan taraf hidup, pendidikan, dan kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara di masa mendatang, dan tentu akan mempengaruhi masa depan dan posisi negara tersebut di dunia. Oleh karena itu, bersama-sama dengan Pemerintah, DPR-RI sangat mendukung pencapaian MDGs. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) MDGs dibawah BKSAP pada bulan Maret 2010. Selain untuk mendukung upaya-upaya pemerintah, Panja MDGs dibentuk untuk menggali dukungan internasional khususnya negara-negara maju dan mengingatkan agar komitmen mereka dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian MDGs tetap terjaga.

Beberapa target yang ingin dicapai oleh Panitia Kerja MDGs adalah peningkatan peran serta Anggota DPR dalam pembuatan regulasi untuk percepatan pencapaian MDGs, peningkatan kapasitas DPR dalam pengawasan pencapaian MDGs, kebijakan anggaran yang berpihak pada pencapaian MDGs, peningkatan kerjasama antarparlemen dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP dan UNICEF dalam berbagi informasi dan pengetahuan tentang pencapaian MDGs, serta menjadi *Focal Point* DPR untuk MDGs dan mendorong pemerintah dan para *stakeholders* untuk percepatan pencapaian MDGs tahun 2015.

Sejak terbentuknya dalam Rapat Pleno BKSAP tanggal 10 April 2010, Panja MDGs BKSAP DPR-RI telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Menghadiri undangan *Cambodia MDGs Parliament Group*, semacam kaukus Parlemen Kamboja mengenai MDGs, pada tanggal 7 Mei 2010 di Phonm Pehn, Kamboja.
2. Rapat koordinasi dengan Duta Besar Indonesia untuk MDGS, DR. Dr. Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Sp. M. (K), UNDP, *United Nations Millennium Campaign* (UNMC), UNICEF dan World Bank, pada 20 Mei 2010.

3. Mengadakan Rapat Konsultasi Panja MDGs dengan pihak Pemerintah yaitu BAPPENAS, Kemenko Kesra, Kemkes, serta Kemeneg PP dan PA, pada tanggal 27 Mei 2010.
4. Ketua Panja diminta menjadi panelis pada pertemuan *Development Cooperation Forum of the UN* pada 3 – 4 Juni 2010 di Helsinki, Finlandia dengan tema *Impact of Development Cooperation in Reaching the MDGs on Gender Equality: Challenges and Solutions*.
5. Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara di dunia yang dijadikan IPU dalam *Analytical Study of the Effectiveness of Parliamentary Mechanism on the MDGs*. Indonesia terpilih karena dianggap cukup efektif dalam melakukan pengawasan atas langkah-langkah pemerintah dan ikut mendukung kebijakan nasional dalam pencapaian MDGs. Kunjungan pejabat IPU ke DPR-RI, Dr. Elisabete Azevedo, telah dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juli 2010.

Pada pertemuan tersebut, Dr. Azevedo bertemu dengan Wakil Ketua DPR Bidang Kesra, Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X DPR-RI, Anggota Panja MDGs, Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, serta Tenaga Ahli Komisi dan Badan terkait.

Pertemuan konsultasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi bagi *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dalam menyusun laporan pelaksanaan MDGs dalam perspektif parlemen dan mengetahui komitmen anggota parlemen Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs.

Dari konsultasi tersebut dapat disimpulkan bahwa DPR-RI sebagai pelaksana fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi telah mendukung terwujudnya MDGs yaitu dengan menggunakan MDGs sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama dalam rapat-rapat komisi dengan *partner* kerjanya. Parlemen Indonesia yang mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat telah berupaya memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang diwakilinya yaitu membangun kehidupan yang lebih baik dan dapat membuka peluang untuk berperan aktif mencapai terwujudnya MDGs.

6. Ketua Panja mengikuti *Special Ministerial Meeting for MDGs Review in Asia and the Pacific: Run Up to 2015* yang diadakan oleh Kemenlu RI di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2010.
7. Panja mengadakan *Parliaments Stands Up for MDGs: DPR-RI Bangkit, Beraksi dan Bersuara untuk Tujuan Pembangunan Millenium* di Operation Room, Gedung DPR-RI pada tanggal 17 September 2010.
8. Perwakilan Panja mengikuti *MDGs Summit* pada 20 – 22 September 2010 di New York, Amerika Serikat. Hasil dari IPU *Analytical Study of the Effectiveness of Parliamentary Mechanism on the MDGs* juga telah dilaporkan oleh Ketua Panja MDGs dalam *MDGs Summit* pada tanggal 21 September 2010 dan juga di dalam pertemuan *Committee of the UN Affairs* di *Assembly* ke-123 IPU Jenewa pada tanggal 4 Oktober 2010.
9. Sekretaris Panja memberikan paparan mengenai Panja MDGs pada kesempatan mengikuti Sidang ke-6 ASEP pada tanggal 25 – 29 September 2010 di Brussel, Belgia.
10. Ketua Panja MDGs menjadi *Keynote Speaker* dalam *APA Sub Committee Meeting on Alleviating Poverty* di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2010.
11. Audiensi dari *stakeholders* mengenai target MDGs 3 tentang HIV/AIDS pada tanggal 25 Oktober 2010 yaitu dengan Jaringan Orang Tertular HIV/AIDS (JOTHI), *United Nations General Assembly Special Session on AIDS* (UNGASS AIDS), dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
12. Melaksanakan Kunjungan Lapangan Panja MDGs ke daerah yaitu ke Kupang, NTT dan Malang, Jawa Timur, pada tanggal 13 – 15 Desember 2010.
13. Menyusun rekomendasi kepada DPR dan pemerintah untuk percepatan pencapaian MDGs 2015, serta Buku Pegangan untuk Anggota DPR dalam berperan untuk pencapaian MDGs.

VII. RANGKUMAN CAPAIAN BKSAP

Beberapa pencapaian BKSAP DPR-RI yang patut mendapat perhatian selama periode Oktober 2009 sampai Oktober 2010 antara lain:

- A. Kontribusi pada hasil sidang pada konferensi internasional, regional, dan multilateral, dimana anggota DPR-RI yang tergabung dalam delegasi selalu mengupayakan menjadi bagian dari *drafting committee*.
- B. Kepercayaan untuk memegang beberapa posisi penting di berbagai organisasi parlemen internasional. Posisi penting tersebut membuktikan kecemerlangan kiprah diplomasi DPR-RI dan kepercayaan parlemen-parlemen di dunia terhadap kapasitas DPR-RI yang semakin meningkat. Posisi-posisi tersebut antara lain:
 - 1. Jabatan sebagai Presiden APA (periode tahun 2008 – 2010) dan Ketua Executive Council APA (periode tahun 2008 – 2010).
 - 2. Jabatan Presiden FASPPED (Periode tahun 2008 – 2010). Namun Indonesia masih menjadi anggota *Honorary Exexutive Bureau* FASPPED sampai dengan tahun 2012.
 - 3. Indonesia menjadi *Chairperson of Asia Pacific Group* (APG) IPU selama 1 tahun (periode Oktober 2010 – Oktober 2011).
 - 4. Indonesia menjadi *Presiden the 7th PUIC Conference* (periode tahun 2012 – 2014) dan juga Wakil Presiden *PUIC Council* (untuk periode 2010 – 2012).
 - 5. Indonesia duduk di *Executive Committee of PUIC* (sampai dengan 2012).
 - 6. Indonesia menjadi *1st Vice-President of IPU Women Coordinating Committee IPU* (sampai dengan 2014).
 - 7. Indonesia menjadi Anggota Tetap *International Humanitarian Law* (IHL) IPU (sampai dengan 2014).
 - 8. Indonesia menjadi Anggota tetap *Committee of Middle East Question IPU* (sampai dengan 2013).
 - 9. Indonesia menjadi Anggota *Peparatory Committee (Prep Com)* untuk *World Conference Speaker of Parliaments*.
- C. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) MDGs BKSAP DPR-RI yang semakin memperkuat komitmen DPR untuk mendukung percepatan pencapaian MDGs terutama di Indonesia.

- D. Kesuksesan dalam penyelenggaraan berbagai sidang di Indonesia telah memperkuat citra positif dan membuat Indonesia menjadi parlemen yang diperhitungkan kontribusinya di tingkat regional khususnya dan internasional pada umumnya.
- E. Khusus untuk FASPPED, kesuksesan the *1st Session of FASPPED General Assembly* di Jakarta tanggal 6 – 7 Juli 2010 bukan saja dalam hal penyelenggaraan dan substansi hasil sidang, namun juga masukan Indonesia untuk penguatan struktur FASPPED misalnya:
 - a. Untuk meningkatkan efektifitas FASPPED, Indonesia juga berhasil mengamandemen Statuta FASPPED mengenai syarat Presiden FASPPED yang harus seorang Ketua Parlemen, atau sekurang-kurangnya Ketua Komisi dalam bidang pendidikan, untuk menekankan *high profile* pada organisasi baru ini.
 - b. Indonesia, pada masa kepemimpinannya di FASPPED, telah menjadi inisiator dan pengembang pertama website resmi FASPPED yang pengelolaannya kemudian akan dipegang oleh negara yang menjadi Presiden FASPPED selanjutnya. Sebagai informasi, organisasi serupa, yaitu FAPED (*Forum of African Parliamentarians for Education*) dan FARPED (*Forum of Arab Parliamentarians for Education*) tidak memiliki website resmi mengenai organisasinya.
 - c. Indonesia telah mengusulkan logo yang kemudian disetujui oleh Sidang FASPPED sebagai logo resmi FASPPED. Logo ini berupa buku terbuka yang menyangga globe yang menunjukkan peta kawasan Asia Pasifik. Logo ini menggambarkan komitmen FASPPED bagi kemajuan pendidikan (yang dilambangkan dengan buku) yang akan menyangga dan memberikan kemajuan bagi semua orang yang berada di kawasan Asia Pasifik.
- F. Indonesia menggagas penguatan status AIPA, organisasi parlemen ditingkat ASEAN, yang pada mulanya hanya disebut *entity* dalam *ASEAN Charter* sekarang menjadi *the most important partner*.
- G. Menguatkan keanggotaan PUIC dengan mengamandemen Statuta PUIC, agar memungkinkan negara dengan minoritas muslim menjadi *observer* di PUIC.

- H. Indonesia menjadi penggagas adanya mekanisme *Women Meeting* dalam struktur APA. Indonesia menilai hal ini sudah waktunya dengan semakin meningkatnya signifikansi isu-isu yang terkait dengan perempuan termasuk meningkatnya anggota parlemen perempuan di parlemen-parlemen negara Asia.
- I. DPR-RI terpilih menjadi salah satu dari 7 parlemen yang dimuat dalam *Analytical Study of Parliamentary Mechanisms for MDGs* yang merupakan laporan IPU bersama UN *Millennium Campaign*. DPR-RI terpilih karena saat ini dinilai memiliki capaian yang cukup baik dalam mendukung upaya pemerintah mencapai MDGs, di antaranya dengan pembuatan beberapa UU yang mendukung pencapaian target MDGs dan pembentukan Panja MDGs.
- J. Peningkatan *awareness* Anggota DPR-RI atas isu-isu yang mendapat perhatian internasional dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di antaranya:
 1. *“Parliament Stands Up for MDGs: DPR-RI Bangkit Beraksi, Bersuara untuk Tujuan Pembangunan Millenium”* pada tanggal 7 September 2010.
 2. *“Parliaments Take Action on Violence against Women: DPR-RI Beraksi dan Bertindak untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan”*, pada tanggal 22 November 2010.
 3. Penerbitan “Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen: Perdagangan Manusia”. Buku Pedoman ini dibuat berdasarkan *Parliamentarians Handbook on Human Trafficking* yang dibuat oleh IPU untuk Anggota Parlemen. Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen: *Human Trafficking* dibuat berbahasa Indonesia dan menambahkan kondisi kasus tersebut di Indonesia agar dapat lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh Anggota DPR-RI.
- K. Penambahan koleksi buku di perpustakaan BKSAP DPR-RI dimana dalam satu tahun BKSAP kini memiliki sekitar 178 jumlah buku . Katalog perpustakaan BKSAP akan segera diterbitkan awal tahun 2011.
- L. Pembuatan *Database* BKSAP yang saat ini tengah dirintis dengan tujuan untuk menyediakan informasi cepat dan lengkap kepada Anggota BKSAP dan sekretariat mengenai BKSAP dan dokumen-dokumen terkait hasil sidang BKSAP.

VIII. TANTANGAN KINERJA KEDEPAN

Dari pelaksanaan dan pencapaian yang telah diraih BKSAP selama periode Oktober 2009 – Oktober 2010 ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk dilaksanakan di tahun mendatang, yaitu:

Membangun *people to people contact*, *networking*, dan kemitraan

DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat memegang peranan penting dalam membangun *people to people contact*. Untuk itu peran aktif anggota DPR-RI sangat dituntut untuk melakukan kontak dengan negara mitra kerja terutama dengan parlemen terkait. Dengan adanya *people to people contact* DPR-RI dapat memperkenalkan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, menjembatani hal-hal yang menghambat hubungan kedua negara dan mempromosikan Indonesia di forum internasional, termasuk untuk menarik kerjasama investor asing di Indonesia.

Anggota DPR-RI diharapkan terus membangun *link* (mitra kerja) dengan parlemen negara lain, melalui kaukus-kaucus yang ada, dengan anggota parlemen yang menjadi mitra kerja, dengan organisasi-organisasi internasional dan NGO, maupun secara individu. Dengan demikian DPR-RI dapat mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, serta dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian masalah-masalah nasional, internasional dan regional. Tuntutan yang sangat mendasar dan yang perlu terus-menerus dijaga adalah memelihara komunikasi dan kerjasama yang sudah ada, sehingga komunikasi tidak pernah terputus dengan negara mitra kerja.

Selain itu BKSAP akan memperkuat koordinasi dengan eksekutif mengingat kemitraan yang mengalami peningkatan signifikan antara organisasi parlemen dengan organisasi dimana Pemerintah Indonesia bergabung misalnya IPU dengan PBB atau PUIC dengan OKI.

Penerimaan tamu delegasi parlemen sahabat yang lebih baik

Sebagai salah satu konsekuensi peningkatan hubungan bilateral dalam hal kunjung dan mengunjungi, DPR-RI baik di tingkat AKD, GKSB, maupun Pimpinan Dewan telah mengadakan kunjungan kerja dan muhibah ke luar negeri. Sebaliknya, DPR-RI pun kerap menerima tamu

delegasi parlemen asing. Sampai saat ini delegasi parlemen Indonesia keluar negeri diterima oleh parlemen sahabat dengan baik, malah ada yang sangat baik.

Tentulah sudah seharusnya apabila DPR-RI dapat menerima kunjungan maupun kunjungan balasan dari delegasi parlemen negara sahabat yang dipimpin oleh Pimpinan maupun Anggotanya, agar citra positif dan capaian konstruktif yang selama ini direalisasikan oleh DPR-RI yang tercermin dari citra praktek demokrasi di Indonesia maupun kesertaan delegasi DPR-RI dalam berbagai forum parlemen regional maupun internasional selalu dapat dijaga dan dikapitalisasi. Penerimaan resiprokal yang baik tercermin pada penerimaan tamu sejak di bandar udara, *courtesy call* dengan Pimpinan, Komisi, dan/atau Badan yang ada di DPR-RI, jamuan makan, *friendly talk* dengan Anggota GKSB terkait, sampai dengan mengantar kembali ke *airport* untuk pulang dengan kesan yang positif terhadap parlemen Indonesia.

Oleh karena itu, BKSAP mengusulkan kepada Pimpinan DPR-RI untuk membuat suatu ketentuan internal mengenai keprotokolan DPR-RI yang mencakup penerimaan dan penugasan untuk tamu delegasi parlemen negara sahabat.

Memaknai jabatan sebagai *President of the 7th PUIC Conference* (2012 – 2014)

Dengan telah dipilihnya Ketua DPR-RI sebagai *President of the 7th PUIC Conference* membawa konsekuensi tersendiri terutama tanggung jawab untuk melaksanakan sidang PUIC pada tanggal 23 – 31 Januari tahun 2012 dengan sebaik-baiknya. Selain itu, BKSAP juga menetapkan misi untuk memberi bobot pada jabatan Presiden tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong organisasi Parlemen negara-negara anggota OKI ini menjadi organisasi parlemen yang diperhitungkan di kancah internasional khususnya dalam kaitan dengan permasalahan umat Islam, dan keberadaan PUIC dirasakan manfaatnya oleh anggotanya.
2. Mendorong partisipasi aktif parlemen yang telah tergabung dalam PUIC untuk aktif menghadiri dan berkontribusi dalam setiap sidang PUIC.

3. Mendorong parlemen-parlemen anggota PUIC untuk melaksanakan butir-butir yang telah disepakati dalam Resolusi dan Deklarasi PUIC.
4. Mendorong parlemen dari negara anggota OKI yang belum menjadi anggota PUIC (Brunei Darussalam, Komoro, Maladewa, Nigeria, Suriname, dan Uzbekistan) untuk dapat menjadi anggota dan aktif di PUIC.
5. Menjadikan PUIC organisasi yang lebih inklusif dengan mengajak parlemen-parlemen yang di negaranya mempunyai komunitas warga muslim (seperti China, Filipina, Rusia, Thailand, dan India) untuk menjadi *observer* di PUIC.
6. Mendorong agar pusat perhatian PUIC yang selama ini adalah masalah-masalah di Timur Tengah dan Afrika agar juga menaruh perhatian serius atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Asia dan belahan dunia lainnya.
7. Mendorong penguatan Sekretariat PUIC agar dapat secara optimal mendukung dinamika PUIC.

Memaknai Posisi sebagai *Chair of the Asia Pacific Geopolitical Group* di IPU (2011)

Pada saat Sidang *Assembly IPU* ke-123 di Jenewa, Swiss, Indonesia memegang tampuk estafet Ketua dari Kelompok Geopolitik Asia Pasifik. Kepemimpinan ini sifatnya bergiliran, namun dari pengalaman yang lalu, ada beberapa parlemen yang berhasil membawa kontribusi signifikan pada kelompok ini pada saat menjadi ketua, misalnya Kanada yang mencetuskan ide *working group* di Asia Pasifik dan China yang memperkuat *rules of procedure* pertemuan geopolitik Asia Pasifik. Kepemimpinan Indonesia untuk tahun 2011 menjadi strategis mengingat pada saat ini IPU sedang membahas *future plan* IPU untuk kurun waktu 2010 – 2015. Indonesia bukan saja harus mampu untuk menggerakkan 27 parlemen anggota di kelompok ini untuk memberikan masukan mereka, namun Indonesia sendiri harus dapat memberikan gagasan dan kontribusi penting atas usulan IPU tersebut.

Efektivitas kunjungan GKSBB ke parlemen *counterpart*

Kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI yang dikelompokkan dalam GKSBB merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara sahabat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri sorotan media masa saat ini terhadap kunjungan ke luar negeri Anggota DPR-RI pada umumnya menjadi pendorong untuk melihat kembali efektivitas kunjungan GKSBB. Selain tiga GKSBB yang telah berangkat, Maroko, Tajikistan dan Cuba, semua kunjungan GKSBB pada tahun 2010 ditunda. Pada saat ini BKSAP tengah menyelesaikan rumusan prosedur dan tata kerja kunjungan GKSBB agar kunjungan GKSBB tersebut berjalan dengan efektif dan bermanfaat bukan saja untuk anggotanya namun untuk masyarakat pada umumnya.

Meningkatkan komitmen Anggota BKSAP

Walaupun secara umum delegasi ke sidang regional dan internasional berjalan dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua anggota delegasi mempunyai komitmen yang sama baik dalam persiapan delegasi seperti misalnya mempersiapkan materi sebelum keberangkatan maupun untuk memberi kontribusi yang maksimal pada saat berlangsungnya sidang. Untuk meminimalisir kendala tersebut, Pimpinan BKSAP mengedarkan surat pernyataan komitmen yang harus ditandatangani oleh anggota sebuah delegasi yang telah menyetujui untuk ditugaskan ke sebuah sidang agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan penugasan tersebut. Surat pernyataan ini telah dimulai pada akhir November 2010 dan akan selalu diberlakukan untuk kegiatan kunjungan maupun sidang yang dihadiri oleh anggota BKSAP. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kehadiran dan kontribusi yang baik pada forum internasional maupun regional.

Implementasi partisipasi di sidang regional dan internasional

Yang menjadi tanggung jawab terpenting dari tugas diplomasi DPR-RI adalah tindak lanjut dan implementasi dari resolusi-resolusi hasil sidang parlemen. Sebuah kenyataan bahwa resolusi yang dihasilkan dalam sidang parlemen cenderung bersifat *moral binding* dan bukan *legally*

binding yang dapat memaksa para penandatangan ataupun anggotanya untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang tersebut. Akan tetapi, karena telah hadir di sidang dan bersungguh-sungguh dalam pembahasan hasil sidang tersebut, BKSAP perlu mendorong DPR-RI dan pemerintah untuk melaksanakan hasil sidang tersebut. Hal yang biasa dilakukan adalah menyampaikan laporan hasil sidang ke Komisi dan Badan di DPR dengan harapan untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan mitra kerja. Namun mengingat banyaknya isu yang muncul di Komisi, kedepan BKSAP akan membuat kajian atas hasil sidang sehingga yang disampaikan ke Komisi/Badan adalah poin-poin untuk mendapat perhatian dan prioritas.

PENUTUP

Laporan kinerja tahunan ini adalah bagian dari bentuk akuntabilitas kepada Dewan dan publik atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKSAP dalam kurun waktu Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2010. Masukan dan saran dari semua pihak untuk kinerja BKSAP yang lebih baik di tahun-tahun mendatang akan sangat berarti.